

**SKRIPSI**

**PERANAN SEKTOR BASIS TERHADAP PENYERAPAN TENAGA  
KERJA DI PROVINSI RIAU**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Riau*



Oleh :

**WILLY DIO PRAKOSO**  
**155110421**

**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2019**



# **UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

## **FAKULTAS EKONOMI**

*Alamat:*JalanKaharuddinNasution No.113 PerhentianMarpoyanTelp.  
(0762)674681

Fax ( 0761 )674834 PEKANBARU - 28284

---

### HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : WILLY DIO PRAKOSO  
NPM : 155110421  
FAKULTAS : EKONOMI  
PROGRAM STUDY : EKONOMI PEMBANGUNAN  
KONSENTRASI : -  
PEMBIMBING I : Drs.M. Nur., MM  
PEMBIMBING II : Sinta Yulianti, SE., M.Ec., Dev  
JUDUL :PERANAN SEKTOR BASIS TERHADAP  
PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI  
RIAU

DISETUJUI:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs.M. Nur., MM

Sinta Yulianti, SE., M.Ec., Dev

MENGETAHUI:

DEKAN

KETUA JURUSAN

Drs.H.Abrar, M.Si, Ak, CA

Dra.Hj.EllyanSastraningsih,M.Si

LEMBARAN PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

NAMA : WILLY DIO PRAKOSO  
NPM : 155110421  
FAKULTAS : EKONOMI  
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN  
JUDUL : PERANAN SEKTOR BASIS TERHADAP PENYERAPAN  
TENAGA KERJA DI PROVINSI RIAU

Team Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra.Hj.Ellyan Sastraningsih,M.Si	(.....)
2. Drs.H.Armis,M.Si	(.....)
3. Hj.Nawarti Bustamam,SE.M.Si	(.....)

Disetujui :

PEMBIMBING 1

PEMBIMBING 2

Drs.M.Nur,M.Si

Sinta Yulyanti,SE.,M.Ec.,Dev

KETUA JURUSAN  
EKONOMI PEMBANGUNAN

Dra.Hj.Ellyan Sastraningsih,M.Si

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : WILLY DIO PRAKOSO  
NPM : 155110421  
FAKULTAS : EKONOMI  
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN  
JENJANG PENDIDIKAN : STRATA 1 (S1)  
SPONSOR : Drs. M. Nur, MM  
CO SPONSOR : Sinta Yulianti, SE., M.EC, Dev  
JUDUL SKRIPSI : PERANAN SEKTOR BASIS TERHADAP  
PERNYERAPAN TENAGA KERJA DI  
PROVINSI RIAU

NO	Tanggal	Sponsor	Co Sponsor	Catatan Pembimbing	Paraf
1	20/09/2018	X		Perbaiki Rumusan Masalah, Hipotesa, Teori.	
2	26/09/2018	X		Perbaiki Penelitian Terdahulu.	
3	09/10/2018	X		Lanjut ke Pembimbing II	
4	22/10/2018		X	Perbaiki Latar Belakang, Analisa Data.	
5	27/10/2018		X	Perbaiki Analisa Data	
6	29/10/2018		X	Acc Seminar Proposal	
7	29/11/2018	X		Perbaiki Hasil Penelitian	
8	04/11/2018	X		Lanjut ke Pembimbing II	
9	05/11/2018		X	Sistematika Penulisan, Perbaiki Lampiran	
10	10/12/2018		X	Acc Seminar Hasil	
11	10/12/2018	X		Acc Seminar Hasil	

Pekanbaru february 2019

Dr. Firdaus AR, SE. Msi, AK. CA

## LEMBARAN PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : Willy Dio Prakoso  
Tempat/Tgl Lahir : Air Molek, 06-09-1997  
NPM :155110421  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Ekonomi Pembangunan  
Judul Skripsi : Peranan Sektor Basis Terhadap Penyerapan  
Tenaga Kerja Di Provinsi Riau

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah murni dari hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil karya orang lain (**bukan plagiat/duplikasi**) dan sistematika penulisanya sudah mengikuti kaidah dari karya tulis ilmiah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut atau dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 27 Maret 2019

Willy Dio Prakoso

## ABSTRAK

### PERANAN SEKTOR BASIS TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI RIAU

Willy Dio Prakoso  
155110421

Dibawah Bimbingan I : Drs. M. Nur, MM  
Bimbingan II : Sinta Yulianti, SE., M.EC, Dev

*Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Riau, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sektor apa yang menjadi sektor basis di Provinsi Riau, dan untuk mengetahui peranan sektor basis terhadap penyerapan tenaga kerja dan angka elastisitas kesempatan kerja di Provinsi Riau. Analisa data yang digunakan penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu metode Location Quotient (LQ), metode yang membandingkan PDRB Provinsi Riau terhadap PDB memberikan nilai LQ yang menunjukkan kegiatan ekonomi basis atau non basis pada Provinsi Riau. Serta menggunakan analisa elastisitas tenaga kerja dalam melihat peranan sektor basis terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau. Dari hasil penelitian ini adapun faktor-faktor penentu sektor basis di Provinsi Riau adalah besarnya perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) persektor, dari hasil penelitian ini diketahui bahwa dari sembilan sektor lapangan usaha yang membentuk PDRB Provinsi Riau, sektor yang memiliki  $LQ > 1$  terdapat pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian. Sektor ekonomi yang berperan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau terdapat pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 4,82%, ini merupakan sektor yang memberikan sumbangan tertinggi dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau, dan tertinggi nomor dua adalah sektor Pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan sebesar -0,75%.*

**Kata kunci** : Pertumbuhan Ekonomi, PDRB, Nilai LQ, Elastisitas Kesempatan Kerja

## ABSTRACT

### THE ROLE OF BASE SECTOR ON EMPLOYMENT IN RIAU PROVINCE

Willy Dio Prakoso  
155110421

Under        Consultant I        : Drs. M. Nur, MM  
                  Consultant II        : Sinta Yulianti, SE., M.EC, Dev

*This research was carried out in Riau Province; the purpose of this research is to find out what sectors is being the base sector in Riau Province, and to find out the role of base sector on employment and the number of employment opportunity elasticity in Riau Province. Data analysis that used in this research is quantitative method, which is Location Quotient (LQ) method, namely a method that compares PDRB Riau Province to PDB giving LQ value that indicates a base or non-base economy activity in Riau Province. Moreover, this research used analysis of employment elasticity to see the role of base sector on employment in Riau Province. From this research, the determining factors of base sector in Riau Province is the high ratio of Gross Regional Domestic Product (PDRB) each sector, this research shows that from nine business fields that unite as PDRB in Riau Province, sectors with  $LQ > 1$  are agriculture sector, plantation sector, forestry sector, fisheries sector, mining sector, and quarrying sector. Economy sectors that play a role in employment in Riau Province are mining sector and quarrying sector in the amount of 4,82%, these are the sectors that contribute the highest in employment in Riau Province, and the second highest contributions in employment are agriculture sector, plantation sector, forestry sector, and fisheries sector in the amount of -0,75%*

**Keywords** : Economy growth, PDRB, LQ value, Employment Elasticity

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan yang telah ditetapkan untuk dapat mengikuti ujian comprehensive sarjana lengkap pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dengan judul “PERANAN SEKTOR BASIS TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI RIAU”

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Hasil yang sederhana ini tidak dapat penulis capai apabila tidak ada bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak sehingga terwujudnya skripsi ini. Dan dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Abrar, M.Si., Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
2. Ibuk Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Bapak Drs. M. Nur, MM selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiranya dalam memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibuk Sinta Yulianti, SE., M.Ec, Dev selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiranya untuk memberikan arahan, pencerahan dan masukan serta menyempurnakan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmu luar biasa hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu beserta staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Khususnya pada jurusan Ekonomi Pembangunan,
7. Khususnya penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua ayah (Toni Supriono) dan Ibu (Yusdiana) yang tidak dapat di tuliskan di sini apa yang telah mereka perbuat selama ini terhadap penulis. Sungguh Anugrah yang luar biasa dari Allah SWT kedua orang tua kepada Penulis. Kasih sayang, dan cinta yang tidak pernah lekang oleh waktu.
8. Kepada saudara kandung , abang Rino Yuhendra dan adik Vinia Valerina yang menjadikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat penulis, yang terus menemani hingga saat ini yaitu : Hermanto, Fitri Yeni, Fitri Mardianingsih, Ayu Tuttuman, Mutia Andriani, Putri Rahmadani, Nurfika Anggela.
10. Bapak dan Ibuk Kepala Badan Pusat Statistika Provinsi Riau beserta staf yang telah membantu memberikan data dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Orang yang telah banyak memberikan motivasi, semangat serta dukungan kepada penulis yaitu teman-teman angkatan 2015 yang selalu memberikan

dukungan yang telah membantu dan partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Dan kepada pihak semua yang belum tersebut namanya, penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sebagai bahan pertimbangan, acuan serta bagian peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sama.

Dan buat yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini, penulis mendoakan, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang sebesar-besarnya dan membalas kebaikan mereka, Aamiin Yarobbal Alamin.

Pekanbaru, Maret 2019

Penulis

Willy Dio Prakoso

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Ruang Lingkup.....	9
1.6. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Pustaka .....	11
2.1.1. Teori Basis Ekonomi.....	11
2.1.2. Teori dan Konsep Keunggulan Komperatif .....	13
2.1.3. Teori dan Konesep Ketenagakerjaan.....	16
2.1.4. Permintaan Tenaga Kerja .....	19
2.1.5. Penawaran Tenaga Kerja.....	19
2.1.6. Elastisitas Kesempatan Kerja .....	20
2.2. Penelitian Terdahulu .....	25
2.2 Kerangka Pikir Penelitian.....	26

2.3. Hipotesis.....	28
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Lokasi Penelitian .....	29
3.2. Oprasional Variabel Penelitian.....	29
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	29
3.4. Populasi dan Sampel .....	30
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.6. Analisis Data .....	30
<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN</b>	
4.1. Letak dan Keadaan Geografis Provinsi Riau .....	33
4.2. Iklim dan Curah Hujan .....	38
4.3. Kependudukan Provinsi Riau.....	38
4.3.1. Penduduk dan Perkembanganya.....	38
5.3.2. Penduduk Menurut Mata Pencarian .....	41
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1 Analisa Sektor Basis di Provinsi Riau.....	43
5.1.1. Analisa Location Quotient .....	43
5.1.2. Perbandingan PDRB Persektor di Provinsi Riau .....	45
5.2. Peranan Sektor Basis Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Riau .....	49
5.2.1. Elastisitas Tenaga Kerja Provinsi Riau .....	49
5.2.2 Peranan Sektor Basis Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Elastisitas Kesempatan Kerja di Provinsi Riau .....	53

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan.....	58
5.2. Saran.....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : PDRB Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) 2011-2015.....	5
Tabel 1.2 : Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu menurut Lapangan Usaha Utama, 2011-2015.....	7
Tabel 4.1 : Banyak Kecamatan dan Kelurahan/Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2016.....	37
Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2016.....	40
Tabel 4.3 : Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu menurut Lapangan Usaha Utama, Tahun 2015.....	43
Tabel 5.1 : Location Quotient (LQ) Provinsi Riau 2011-2017 .....	44
Tabel 5.2: Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2011-2017 .....	46
Tabel 5.3 : Pertumbuhan Tenaga Kerja setiap Sektor di Provinsi Riau 2011-2017	50
Tabel 5.4 : Pertumbuhan PDRB Setiap Sektor di Provinsi Riau Tahun 2011-2017	51
Tabel 5.5 : Rekapitulasi Perhitungan Elastisitas Tenaga Kerja Provinsi Riau Tahun 2017.....	53

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian dan merupakan fenomena penting yang dialami oleh perekonomian seluruh dunia, termasuk perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu tolak ukur adanya pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pembangunan sektor ekonomi merupakan suatu keadaan supaya lebih baik tujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja, dan kemakmuran masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, masalah utama yang dihadapi oleh setiap negara berkembang termasuk Indonesia adalah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, dan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu proses kenaikan pendapatan perkapita daerah dalam jangka panjang. Teori pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah adanya permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga sumber daya lokal berpotensi menghasilkan pendapatan daerah sekaligus dapat menciptakan peluang kerja di daerah. Hal ini berarti bahwa sumber daya lokal baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia memegang peranan yang sangat strategis dalam perekonomian daerah. Sumber daya lokal yang merupakan potensi ekonomi harus dapat dikembangkan secara optimal sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Limbong, 2009).

Selanjutnya pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional. Pendapatan perkapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah, sedangkan pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang di ciptakan dalam suatu perekonomian di dalam suatu perekonomian di masa satu tahun. Pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita dari masa ke masa dapat di gunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dan juga perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah (Suryana, 2000:67).

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang berkelanjutan menuju peningkatan kualitas kehidupan yang menempatkan manusia sebagai pelaku, dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya alam yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan harus dapat memberikan pilihan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan harus dilakukan secara bertahap di segala bidang dan sektor maupun sub sektor secara terencana dan terprogram.

Pembangunan yang pesat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disisi lain pembangunan yang pesat memberikan tekanan yang besar pada sumber daya alam mendukung lingkungan. Tidak mustahil akhirnya sumber daya alam dan lingkungan tidak mampu ikut memberikan kontribusi dalam pembangun. Malahan menjadi hancur. Apabila sumber daya alam telah hancur, maka pertumbuhan ekonomi dan pembangunan juga ikut akan menurun drastis.

UU RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU RI No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah menunjukkan mengenai kebijakan otonomi daerah di negara Indonesia. Dengan demikian, maka pemerintah daerah memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi dan kehendak masyarakat daerah tersebut. Agar pelaksanaan pembangunan daerah ini berhasil maka pemerintah daerah harus mengetahui potensi daerahnya masing-masing guna menentukan ke arah mana pembangunan di daerah tersebut akan digiring.

Sektor unggulan merupakan sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan berpengaruh positif jika dikembangkan dengan sektor-sektor unggulan yang lain atau terhadap perekonomian daerah secara umum. Sektor unggulan merupakan jenis lapangan usaha yang berpotensi untuk dikembangkan dalam menciptakan kesejahteraan. Masing-masing pemerintah daerah diasumsikan mengenal secara baik seluruh potensi ekonomi yang tersedia di daerahnya. Setelah mengetahui potensi yang ada, agenda selanjutnya adalah menentukan skala prioritas unggulan, secara sektoral bahkan sampai ke level manfaat. Arah perencanaan pembangunan, alokasi sumberdaya, tata ruang wilayah, dan lain-lainnya sejauh ini mungkin dapat mendukung pengembangan sektor unggulan. Termasuk bagaimana memasarkan dan mempromosikan sektor tersebut, sehingga diketahui dan menarik minat pihak luar (*investor*) untuk turut serta dalam pengembangannya suatu wilayah. Menurut Tarigan (2005:28) “Hanya kegiatan basis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.”

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu proses kenaikan pendapatan perkapita daerah dalam jangka panjang. Teori pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah adanya permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga sumber daya lokal berpotensi menghasilkan pendapatan daerah sekaligus dapat menciptakan peluang kerja di daerah. Hal ini berarti bahwa sumber daya lokal baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia memegang peranan yang sangat strategis dalam perekonomian daerah. Sumber daya lokal yang merupakan potensi ekonomi harus dapat dikembangkan secara optimal sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Darman, 2015:3).

Selanjutnya pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional. Pendapatan perkapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah sedangkan pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam suatu perekonomian di masa satu tahun. Pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita dari masa ke masa dapat digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dan juga perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah.

Provinsi Riau melalui pemerintah daerah berupaya mewujudkan hal tersebut, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pembangunan ekonomi. Berdasarkan data dari badan pusat statistika dapat kita lihat PDRB Provinsi Riau atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 : PDRB Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku menurut LapanganUsaha (Miliar Rupiah) 2011-2015

N O	Kategori PDRB (Lapus)	PDRB ADHB Lapangan Usaha Tahunan (Milyar Rupiah)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	99.561,48	106.538,79	115.444,55	133.550,01	144.218,91
2	Pertambangan dan Penggalian	189.902,42	235.437,55	256.395,34	268.819,88	201.796,80
3	Industri	107.243,25	115.048,88	124.879,98	141.874,68	155.685,92
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	58,95	63,38	62,20	65,79	72,06
5	Konstruksi	30.647,06	34.843,61	38.268,20	45.437,97	51.673,30
6	Perdagangan, Rumah Makan, dan Akomodasi	32.895,93	37.354,93	40.289,00	52.868,66	57.952,65
7	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	2.875,28	3.311,21	3.760,84	4.457,96	5.185,48
8	Lembaga Keuangan	3.416,36	4.253,65	4.925,50	5.430,50	5.664,92
9	Jasa Kemasyarakatan	612,05	705,87	787,62	955,16	1.176,04
	Jumlah	467.212,78	537.557,87	584.813,23	653.460,61	623.426,08

Sumber : BPS Provinsi Riau Tahun, 2018

Pada tabel 1.1. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) distribusi PDRB Provinsi Riau pada tahun 2011-2015. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya adalah sektor pertambangan dan penggalian, kemudian nomor dua adalah sektor industri pengolahan dan berikutnya adalah sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan.

Kemudian sektor ekonomi yang sangat kecil memberikan kontribusi rata-rata setiap tahunnya adalah sektor jasa perusahaan dan kedua yang terkecil adalah sektor listrik, gas dan air minum, nomor urut kedua terendah sektor jasa kemasyarakatan dan disusul dengan sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi.

Indikator ekonomi makro berupa distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau terus meningkat setiap tahunnya sejak tahun 2011-2015 merupakan gambaran keberhasilan pembangunan prekonomian di Provinsi Riau. Untuk mendukung PDRB tersebut maka titik berat pembangunan pada sektor perdagangan, komunikasi/angkutan serta jasa-jasa disamping memperhatikan sektor pertambangan sebagai penghasil bahan baku. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat telah memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat di Provinsi Riau sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Pertumbuhan penduduk terus meningkat dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong penghambat dalam perkembangan ekonomi terkhususnya ekonomi Provinsi Riau. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan memungkinkan negara itu menambah produksi.

Pertumbuhan penduduk yang meningkat dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong dan penghambat dalam perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan menambah produksi di daerah tersebut. Disamping itu sebagai akibat pendidikan, latihan, pengalaman kerja, kemahiran penduduk akan semakin meningkat maka produktifitas akan bertambah dan selanjutnya menimbulkan pertambahan produksi menjadi cepat dari pada pertumbuhan kerja. Hal ini tentunya akan berdampak baik jika semua berjalan sesuai dengan teori. Tetapi akan sebaliknya jika pertumbuhan penduduk atau bertambahnya penduduk terus meningkat dan tidak menghasilkan produksi, itu akan menjadikan efek yang tidak baik bagi suatu daerah.

Tabel 1.2 : Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu menurut Lapangan Usaha Utama, 2011-2015

N O	Lapangan Usaha Utama	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	46,80	44,70	46,31	42,41	46,09
2	Pertambangan dan Penggalian	1,55	1,90	1,62	1,73	1,32
3	Industri	6,01	6,10	4,79	5,51	4,90
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	0,42	0,30	0,23	0,31	0,12
5	Konstruksi	5,15	5,10	4,71	5,54	4,84
6	Perdagangan Rumah Makan dan Akomodasi	20,25	20,50	20,78	20,50	16,04
7	Transortasi, Pergudangan, dan Komunikasi	3,93	4,00	3,55	3,79	3,85
8	Lembaga Keuangan	2,32	2,90	2,93	2,29	2,98
9	Jasa Kemasyarakatan	15,55	14,30	15,07	17,91	19,85
	Jumlah	100	100	100	100	100

*Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Riau Tahun, 2015*

Dengan melihat perkembangan masing-masing sektor unggulan dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Riau yang mengalami pasang surut, diperlukan pengkajian terhadap pertumbuhan dan kontribusi terhadap sektor-sektor ekonomi serta pengkajian terhadap sektor unggulan yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan ekonomi di Riau.

Dengan mengetahui dan memahami kinerja sektor unggulan dalam pembangunan maka pemerintah Riau dapat memutuskan serangkaian kebijakan pembangunan, khususnya yang terkait dengan ketersediaan kesempatan kerja yang luas di sektor unggulan. Karena dengan pengembangan sektor unggulan maka sektor yang memiliki prospek tersebut dapat dijadikan tulang punggung atau andalan sebagai modal dasar dalam rangka pembangunan perekonomian

khususnya dalam merangsang terciptanya kesempatan kerja, guna meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Riau di masa yang akan datang.

Berdasarkan data-data diatas, penelitian mengambil topik dengan judul “PERANAN SEKTOR BASIS TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI RIAU”.

#### 1.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sektor apa yang menjadi sektor basis di Provinsi Riau?
2. Berapa besar peranan sektor basis terhadap penyerapan tenaga kerja dan angka elastisitas kesempatan kerja sektor basis di Provinsi Riau?

#### 1.3. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui sektor apa yang menjadi sektor basis di Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui seberapa besar peranan sektor basis terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau dan mengetahui angka elastisitas kesempatan kerja sektor basis di Provinsi Riau.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait seperti :

1. Bagi pemerintah daerah, diharapkan sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran yang dapat dipertimbangkan bagi pemerintah Provinsi Riau.
2. Bagi pihak lain, sebagai bahan referensi pembandingan bagi penelitian selanjutnya dalam rangka memperkaya khasanah penelitian yang sudah ada, sekaligus sebagai informasi bagi masyarakat dan para investor yang ingin menanamkan modalnya di Provinsi Riau.
3. Bagi peneliti, kegiatan ini merupakan langkah awal dari pengaplikasian ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau, serta pengalaman yang bisa dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang.

#### 1.5. Ruang Lingkup

Berdasarkan dari rumusan masalah dan tujuan penelitian ini agar lebih terarah maka yang menjadi ruang lingkup kali ini adalah sektor unggulan dan tenaga kerja, dengan adanya sektor unggulan dan tenaga kerja, agar kita mengetahui sektor mana yang menjadi sektor unggulan, dan mengetahui sektor mana yang lebih banyak menyerap tenaga kerja khususnya di Provinsi Riau.

#### 1.6. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini langkah untuk mempermudah dalam pemahaman, maka penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab dan dari beberapa bab tersebut dibagi

lagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini mengemukakan landasan teori atau kajian pustaka yang merupakan konsep yang disusun secara sistematis tentang variabel dalam sebuah penelitian dan penelitian terdahulu yang merupakan informasi yang diperoleh dari penelitian atau studi yang dilakukan melalui eksperimen atau observasi serta hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah karena masih diperlukan kebenarannya.

**BAB III : METODELOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, jenis & sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data penelitian.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang sejarah dan geografis daerah Provinsi Riau, jumlah kabupaten dan kecamatan, pendidikan, kesehatan, agama, struktur kelembagaan, dll.

**BAB V : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dari peranan sektor basis terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau untuk menjawab hipotesis sebelumnya.

## BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dari penulis sebagai hasil dari penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1. Teori Basis Ekonomi (*Economic Base Theory*)

Teori basis ekonomi ditemukan oleh Harry W. Richardson dalam Tambunan (2003:45) menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah.

Bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja.

Perekonomian regional dapat dibagi menjadi dua sektor, yaitu kegiatan kegiatan basis dan kegiatan-kegiatan bukan basis. Kegiatan-kegiatan basis adalah kegiatan-kegiatan yang mengekspor barang-barang atau jasa-jasa ke tempat di luar batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan atau yang memasarkan barang-barang atau jasa-jasa mereka kepada orang-orang di luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan bukan basis adalah kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan ini tidak mengekspor barang-

barang, jadi luas lingkup produksi mereka dan daerah pasar mereka yang terutama adalah bersifat lokal.

Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk mengidentifikasi apakah suatu sektor atau subsektor ekonomi tergolong kategori basis atau non basis adalah dengan menggunakan metode Location Quotient (LQ), yaitu dengan membandingkan antara pangsa relatif pendapatan (tenaga kerja) sektor i pada tingkat wilayah terhadap pendapatan total wilayah dengan pangsa relatif pendapatan sektor i pada tingkat nasional terhadap pendapatan total nasional. Apabila nilai LQ suatu sektor ekonomi  $\geq 1$  maka sektor ekonomi tersebut merupakan sektor basis dalam perekonomian daerah yang bersangkutan, sedangkan bila nilai LQ suatu sektor atau subsektor ekonomi  $< 1$  maka sektor atau subsektor ekonomi tersebut merupakan sektor non basis dalam perekonomian daerah yang bersangkutan.

logika dasar LQ adalah teori basis ekonomi yang intinya adalah karena industri basis menghasilkan barang-barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan keluar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Selanjutnya, adanya arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi (*consumption*, C) dan investasi (*investment*, I) di daerah tersebut. Hal tersebut selanjutnya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan terhadap industri basis, tetapi juga menaikkan permintaan akan industri non basis (lokal). Kenaikan permintaan (*demand*) ini akan mendorong kenaikan investasi pada

industri yang bersangkutan dan juga industri lain (Robinson Tarigan, 2005:97). Metode *Location Quotient* (LQ) merupakan perbandingan antara pangsa relative pendapatan (tenaga kerja) sektor i pada tingkat wilayah terhadap pendapatan (tenaga kerja) total wilayah dengan pangsa relatif pendapatan (tenaga kerja) sektor i pada tingkat nasional terhadap pendapatan (tenaga kerja) nasional. Hal tersebut secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$LQ_i = \frac{v_i/v_t}{V_i/V_t}$$

dimana:  $v_i$  = pendapatan sektor i pada tingkat wilayah

$v_t$  = pendapatan total wilayah

$V_i$  = pendapatan sektor i pada tingkat nasional

$V_t$  = pendapatan total nasional

Apabila LQ suatu sektor (industri)  $\geq 1$  maka sektor (industri) tersebut merupakan sektor basis. Sedangkan bila nilai LQ suatu sektor (industri)  $< 1$  maka sektor (industri tersebut) merupakan sektor non-basis. Asumsi model LQ ini adalah penduduk di wilayah yang bersangkutan mempunyai pola permintaan wilayah yang sama dengan pola permintaan nasional. Asumsi lainnya adalah bahwa permintaan wilayah akan sesuatu barang akan dipenuhi terlebih dahulu oleh produksi wilayah, kekurangannya diimpor dari wilayah lain.

### 2.1.2 Teori dan Konsep Keunggulan Komperatif

Yang dimaksud dengan keunggulan adalah kelebihan yang melekat pada

suatu komoditi yang dihasilkan suatu negara dibandingkan dengan komoditi serupa yang diproduksi di negara lain.

Ada beberapa faktor yang dapat menjadikan suatu komoditi mempunyai keunggulan tertentu yaitu :

### 1. Faktor Alam

Letak geografis suatu negara, kandungan alam, dan keindahan alam dapat menjadi sebab terciptanya keunggulan tertentu bagi suatu komoditi. Semua jenis keunggulan yang berkaitan dengan faktor alam ini disebut keunggulan mutlak atau *absolute advantage*.

Selain itu juga peranan dari sumber daya alam ini sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Peranan relatif sumber daya alam perkembangannya ekonomi cenderung untuk turun bila perekonomian itu semakin berkembang dengan naiknya pendapatan, maka hasrat berkonsumsi marginal pada sumber-sumber daya alam nampak berkurang (Suparmoko, 2000:115).

### 2. Faktor Biaya Produksi

Manajemen produksi yang baik dapat menekan biaya produksi suatu komoditi. Manajemen produksi nasional yang baik akan melahirkan apa yang lazim (disebut sebagai keunggulan komparatif atau *comparative advantage*). Manajemen produksi suatu perusahaan yang baik akan melahirkan peningkatan daya saing komoditi di pasar internasional.

### 3. Faktor Teknologi

Teknologi yang dipakai dalam produksi menentukan antara lain tingkat kapasitas produksi suatu komoditi. Yang dimaksud dengan tingkat kapasitas

produksi adalah perbandingan jumlah unit produksi yang dihasilkan oleh dua jenis alat produksi yang dipakai dalam memproduksi suatu komoditi yang serupa. Diukur dalam jangka waktu tertentu. Keunggulan yang bersumber dari perbedaan teknologi ini disebut keunggulan teknologi.

Prinsip keunggulan komparatif merupakan salah satu gagasan dalam ilmu ekonomi yang lahir untuk kemudian menjadi landasan oleh berbagai teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional yang mengacu pada prinsip keunggulan komparatif mencoba menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pola perdagangan antara negara yang menyangkut dua aspek. Pertama, aspek normatif, yaitu usaha untuk mencapai pola perdagangan dan produksi yang optimal dipandang dari sudut masing-masing negara maupun dunia secara keseluruhan, dan yang kedua, aspek positif yang menyangkut pertanyaan mengenai pola perdagangan dan produksi yang akan terjadi bila dibuka perdagangan antara negara dengan kondisi pasar tertentu.

Pada dasarnya konsepnya keunggulan komparatif merupakan cara yang dapat menolong kita untuk memahami bagaimana perbedaan diantara negara-negara (daerah-daerah) menimbulkan perdagangan dan mengapa perdagangan ini saling menguntungkan.

Dalam teori ekonomi, keunggulan komparatif mempunyai peran dalam proses realokasi sumber-sumber, dimana hubungan berdasarkan perbandingan biaya dapat diperkirakan dalam menentukan sampai tingkat tertentu pola spesialisasi internasional. Dalam perdagangan yang didasarkan pada keunggulan komparatif ini mekanisme pasar diharapkan dapat berjalan efektif, sehingga

pengendoran dari pembatasan-pembatasan dalam perdagangan akan mendorong realokasi sumber-sumber kearah struktur produksi dan perdagangan yang lebih baik, yang didasarkan pada keunggulan komparatif. Pada dasarnya keunggulan komparatif adalah usaha untuk memaksimalkan pendapatan suatu negara/daerah melalui spesialisasi komoditi-komoditi lain. Jenis komoditas mana yang seharusnya diutamakan produksinya oleh suatu perekonomian.

### 2.1.3 Teori dan Konsep Ketenagakerjaan

Menurut Simanjuntak (2002:132), tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga walaupun tidak bekerja, tetapi mereka secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. Mulyadi (2003:32) menyatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

Tenaga kerja menurut UU No. 13 tahun 2003 adalah setiap orang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Berdasarkan UU No. 25 tahun, 1997 tentang ketenagakerjaan yang di tetapkan tanggal 2 oktober 1998 telah ditentukan bahwa batasan minimal usia seorang tenaga kerja di Indonesia adalah 10 tahun atau lebih. Namun Indonesia tidak menganut batasan maksimal usia

tenaga kerja karena Indonesia belum mempunyai jaminan sosial yang memadai.

Sedangkan BPS membagi tenaga kerja dalam tiga kelompok :

- a. Tenaga kerja belum bekerja atau sementara tidak bekerja adalah tenaga kerja yang bekerja dengan jam kerja  $0 \geq 1$  jam dalam seminggu. Sedangkan menurut payaman simanjutak mengatakan bahwa tenaga kerja atau manpower adalah: “Tenaga kerja yang mencakup penduduk yang sudah atau sedang berkerja, yang sedang mencari kerja dan mengurus rumah tangga. Tiga golongan yang disebut terakhir walaupun sedang tidak bekerja dianggap secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja.”
- b. Tenaga kerja penuh adalah tenaga yang mempunyai jumlah jam kerja  $\geq 35$  jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai uraian tugas.
- c. Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran adalah tenaga kerja dengan jam kerja  $< 35$  jam dalam seminggu.

Tenaga kerja adalah penduduk yang berumur di dalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda –berbeda antara Negara satu dengan lain. batas usia kerja yang di anut oleh Indonesia ialah minimum 15 tahun, tanpabatas umum maksimum. Tenaga kerja dipilah pula kedalam dua kelompok yaitu angkatan kerja ialah (laborforce) dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia yang bekerja, atau yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah tenagakerja

atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan.

Secara praktis pengertian tenaga kerja atau bukan tenaga kerja hanya dibedakan oleh batasan umur. Pada tiap-tiap Negara mempunyai batasan-batasan umur tertentu bagi setiap tenaga kerja. Tujuan dari penentuan batas umur ini adalah supaya definisi yang diberikan dapat menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Tiap Negara memilih batasan umur yang berbeda-beda karena perbedaan situasi tenaga kerja di masing-masing Negara yang berbeda. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja di Indonesia adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi untuk Menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, angkatan kerja dibedakan pula menjadi dua yaitu kelompok pekerja dan penganggur. Pekerja adalah Orang-orang yang mempunyai pekerjaan, mencakup orang yang Mempunyai pekerjaan, dan memang sedang bekerja, serta orang yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara waktu kebetulan sedang tidak bekerja. Adapun yang dimaksud penganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak bekerja tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran di negara sedang berkembang menjadi semakin serius. Tingkat pengangguran terbuka di perkotaan hanya menunjukkan aspek-aspek yang tampak saja dari masalah kesempatan kerja di negara sedang berkembang yang bagaikan ujung sebuah gunung es. Tenaga yang tidak bekerja

secara penuh mempunyai berbagai bentuk dan underemployment di negara sedang berkembang sangat jarang.

Hasil studi ditunjukkan bahwa sekitar 30 persen dari penduduk perkotaan di negara sedang berkembang bisa tidak bekerja secara penuh. Untuk itu dalam mengurangi masalah ketenagakerjaan yang dihadapi negara sedang berkembang perlu adanya solusi yaitu, memberikan upah yang memadai dan menyediakan kesempatan-kesempatan kerja kelompok orang miskin. Oleh karena itu, peningkatan kesempatan kerja merupakan unsur yang paling esensial dalam setiap strategi pembangunan yang menitik beratkan kepada penghapusan (Soebroto, 1996:56).

#### 2.1.4 Permintaan Tenaga Kerja

Menurut Payaman Simanjutak, dasar yang perlu digunakan oleh pengusaha untuk menambah dan mengurangi jumlah karyawan adalah pengusaha perlu memperkirakan tambahan hasil (output) yang di peroleh pengusaha sehubungan dengan penambahan jumlah kuantitas pekerja yang maksimum akan dipekerjakan oleh majikan pada kurun waktu tertentu.

#### 2.1.5 Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi dari upah sehingga jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan dipengaruhi oleh tingkat upah terutama untuk jenis jabatan yang sifatnya khusus. Penawaran tenaga kerja adalah suatu hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Menurut Payaman Simanjutak, analisa penyediaan tenaga kerja berdasarkan keluarga.

Besarnya waktu yang disediakan atau dialokasikan oleh suatu keluarga untuk keperluan bekerja merupakan fungsi dari upah. Penawaran tenaga kerja jika dilihat dengan pendekatan secara makro ekonomi maka penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah penduduk, angkatan kerja, tingkat upah, jenis kelamin, tempat tinggal atau wilayah, tingkat pendidikan. Sedangkan dengan pendekatan mikro ekonomi, sisi dari penawaran tenaga kerja yang dilihat adalah seberapa banyak jam kerja yang digunakan. Dasar pemikiran yang digunakan dalam penawaran tenaga kerja adalah “theory labour/leassure choice” adalah teori pilihan orang untuk bekerja atau tidak bekerja dengan pendekatan yang digunakan adalah pendektan indifferent curve.

#### 2.1.6 Elastisitas Kesempatan Kerja

Elastisitas merupakan ukuran derajat kepekaan jumlah permintaan akan suatu terhadap perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Permintaan tenaga kerja pada dasarnya adalah tergantung pada output perusahaan dalam konteks mikro, artinya semakin banyak output yang dihasilkan pada akhirnya akan menciptakan permintaan input diantaranya adalah tenaga kerja sering dikenal dengan derived demand. Sedangkan dalam tataran makro, produksi nasional sangat menentukan laju tambah kesempatan kerja pada suatu perekonomian. Permintaan sesuatu itu dapat berupa barang, tenaga kerja, produksi dan lain-lain. Koefisien elastisitas dapat dengan pembagian persentase, maka koefisien ini adalah suatu angka yang tidak mempunyai untuk angka murni.

Pengangguran berhubungan dengan ketersediaan lapangan kerja, ketersediaan lapangan berhubungan dengan investasi, sedangkan investasi

didapatkan dari akumulasi tabungan. Semakin tinggi pendapatan nasional maka semakin besarlah harapan untuk pertumbuhan kapasitas produksi yang tertentu saja akan menyerap tenaga kerja baru sehingga meningkatkan kesempatan kerja (Putong, 2007:408).

Perluasan tenaga kerja tidak saja menciptakan lapangan kerja baru tapi juga menciptakan produktifitas pada umumnya. Lapangan kerja yang produktif sepenuhnya akan membuat peningkatan daya beli masyarakat. Meningkatnya daya beli masyarakat mendorong investor untuk memperluas lapangan usaha sehingga terciptanya lapangan kerja baru, hal ini memperluas kesempatan kerja pada umumnya (Subandi, 2008:111).

Penciptaan dan perluasan lapangan kerja adalah merupakan strategi pembangunan agar pertumbuhan ekonomi tetap berlangsung dengan demikian, meningkatnya perluasan kesempatan kerja maka berakibat kenaikan jumlah angkatan kerja diserap ke sektor-sektor ekonomi (Munir dan Budiarto, 2001:3).

Dalam model pertumbuhan (*new growth model*) inovasi teknologi dan investasi model manusia (*human capital*) dilihat sebagai sumber utama pertumbuhan produktifitas dan pertumbuhan produktifitas itu sendiri pada gilirannya menjadi penggerak dari pertumbuhan ekonomi (Muana Naga, 2005:292).

Elastisitas permintaan akan tenaga kerja diartikan sebagai persentase perubahan permintaan akan tenaga kerja sehubungan dengan perubahan satu persen pada tingkat upah. Besar kecilnya elastisitas tergantung dari tiga faktor :

1. Proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi perlengkapan lainya.

2. Elastisitas terhadap barang yang dihasilkan.
3. Kemungkinan substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi yang lain, misalnya modal.

Elastisitas permintaan akan tenaga kerja tergantung dari elastisitas penyedia dari bahan-bahan pelengkap dalam produksi, misalnya mesin-mesin, yang digerakkan dengan tenaga kerja dan sumber-sumber serta bahan-bahan dikelola oleh manusia. Semakin banyak kapasitas mesin yang dioperasikan, semakin banyak tenaga kerja yang diperlukan. Jadi semakin besar elastisitas penyediaan faktor pelengkap misalnya investasi, semakin besar elastisitas permintaan akan tenaga kerja.

Adanya usaha-usaha pembangunan ekonomi nasional, biasanya pada berbagai sektor mengalami pertumbuhan yang berbeda. Sebagian mengalami pertumbuhan yang pesat dan sebagian lagi mengalami pertumbuhan yang lambat. Sehingga kemampuan tiap sektor berbeda dalam menyerap tenaga kerja.

Elastisitas kesempatan kerja didefinisikan sebagai perbandingan laju pertumbuhan ekonomi, elastisitas kerja secara keseluruhan yaitu dapat di rumuskan sebagai berikut :

$$E = \frac{\text{Laju Pertumbuhan Kesempatan Kerja}}{\text{Laju Pertumbuhan Investasi}}$$

Berdasarkan pada definisi dan rumus diatas, maka dapat diartikan bahwa Elastisitas kesempatan kerja merupakan perbandingan laju pertumbuhan

kesempatan kerja dan laju pertumbuhan investasi. Secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$E = \frac{\% \Delta TK}{\% \Delta AI}$$

Dimana : E = Elastisitas Kesempatan Kerja.

$\% \Delta TK$  = Laju Pertumbuhan Tenaga Kerja.

$\% \Delta AI$  = Laju Pertumbuhan Investasi.

Hasil perhitungan elastisitas ini mempunyai beberapa kriteria :

1. Jika E besar 1 atau ( $E > 1$ ) maka dikatakan elastis.
2. Jika E sama dengan 1 atau ( $E = 1$ ) maka dikatakan unitary elastis.
3. Jika E kurang 1 atau ( $E < 1$ ) maka dikatakan tidak elastis.

Negara-negara yang penduduknya sangat padat dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi sering mengalami masalah dalam penyerapan tenaga kerja. Indonesia sebagai salah satu negara berpenduduk padat juga tidak lepas dari permasalahan ini.

Informasi yang terperinci mengenai kelebihan tenaga kerja di Indonesia tidak tersedia, akan tetapi secara umum disetujui bahwa proporsi tenaga kerja yang menganggur adalah sangat tinggi. Selain kenyataan bahwa banyak sekali tenaga kerja yang menganggur adalah sangat tinggi. Selain kenyataan bahwa banyak sekali tenaga kerja terus meningkat, peningkatan ini seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk. Dan pada saat ini banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini ada beberapa teori penelitian terdahulu yang membahas tentang Peranan Sektor Basis Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja yang berkaitan dengan judul tulisan ini yaitu :

No	Nama	Judul	Hasil
1	Darman (2015)	Analisis Sektor Unggulan dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara.	Didasarkan hasil nilai LQ untuk tahun 2004-2013 yang di tinjau dari segi peranan sektor-sektor ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa terdapat 3 sektor ekonomi yang dapat diunggulkan ( $LQ > 1$ ) yaitu : Sektor Pertanian, Pengangkutan dan Jasa-Jasa. Dari hasil nilai LQ untuk tahun 2004-2013 yang ditinjau dari segi perbandingan porsi lapangan kerja per sektor maka penyerapan tenaga kerja yang lebih besar di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu di sektor pertanian.
2	Afred Suci, dan Satria Tri Nanda (2017)	Pemetaan Sektor Ekonomi Unggulan Daerah Dalam Rangka Pemasaran Peluang Investasi Di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau	Seluruh sektor ekonomi atau lapangan usaha di Kabupaten Indragiri Hulu berpeluang untuk dijadikan target pemasaran investasi. Meskipun tidak seluruh sektor merupakan basis/sentra komoditas, namun melihak kepada khusus untuk sektor ekonomi yang merupakan basis unggulan daerah di Kabupaten Indragiri Hulu adalah sektor pertanian; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; transportasi dan pergudangan; akomodasi dan makan minum; real estate/property; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan; jasa lainnya.
3	Selifia Fifi Indriaty (2015)	Peranan Sektor Basis Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Gresik	Sektor ekonomi di Kabupaten Gresik yang diidentifikasi sebagai sektor basis adalah sektor Industri Pengolahan; sektor pertambangan dan penggalian; sektor listrik, gas dan air bersih. Sektor Industri Pengolahan sebagai sektor basis pertama Kabupaten Gresik memiliki tingkat elastisitas yang negatif $-0,076$ , artinya jika

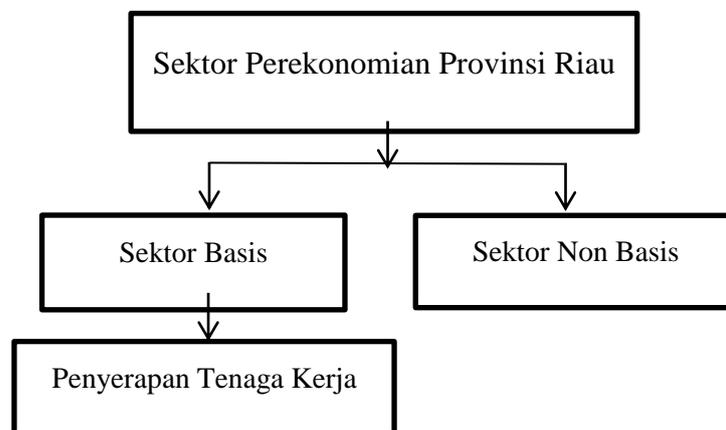
			terjadi kenaikan PDRB sebesar 1 persen maka terjadi penurunan kesempatan kerja sebesar 0,076 persen.
4	Mohammad Setiawan (2014)	Analisis Sektor Ekonomi Basis Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kota Batu	<p>Berdasarkan analisis <i>location quotient</i> sektor basis yang ada di Kota Batu yaitu sektor pertanian, sektor listrik gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta keuangan persewaan dan jasa perusahaan. Sektor pertanian, sektor jasa-jasa dan sektor listrik gas dan air bersih merupakan sektor penopang pertumbuhan ekonomi berdasarkan kriteria pertumbuhan (kompetitif) dan kontribusi pertumbuhan (komperatif) di Kota Batu.</p> <p>Pemerintah Kota Batu menjadikan pertanian sebagai prioritas pembangunan pada tahun 2012 sampai dengan 2017 melalui pengembangan pertanian organik dan perdagangan hasil pertanian yang nantinya diharapkan akan menjadi yang utama.</p>

### 2.3 Kerangka Pikir

Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan Provinsi-Provinsi yang lain. Memiliki beberapa sektor dalam PDRB. Sektor basis di Provinsi Riau di analisis menggunakan alat Analisis location Quotient (LQ) untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang dapat memenuhi permintaan daerah dan mampu mengekspor ke luar/daerah lain. Setiap daerah memiliki keunggulan sektor masing-masing yang jika dikembangkan dengan baik maka akan menjadikan atau mendatangkan efek positif terhadap perekonomian daerah tersebut, terutama sesuai dengan yang di bahas adalah terhadap permintaan tenaga kerja di Provinsi Riau terkhususnya.

Mengetahui sektor basis berdasarkan kriteria pertumbuhan PDRB dan Kesempatan kerja di Provinsi Riau. Hasil analisis LQ tersebut dilanjutkan menggunakan analisis untuk memperoleh deskripsi sektor basis berdasarkan kriteria pertumbuhan dari nilai tambah dan kesempatan kerja. Analisis daya serap tenaga kerja berdasarkan sektor basis menggunakan persamaan elastisitas tenaga kerja.

Gambar I : Kerangka Pikir Penelitian



#### 2.4 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka dapatlah dirumuskan Hipotesa dari penelitian ini adalah:

1. Diduga yang menjadi sektor basis di Provinsi Riau adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Air dan gas, dan sektor Perdagangan Rumah Makan dan Hotel.

2. Diduga sektor basis mempunyai peranan yang besar dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau dan angka elastisitas kesempatan kerja sektor basis di Provinsi Riau adalah elastis.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau, dimana Provinsi Riau mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam kegiatan ekonomi yang cukup pesat.

#### 3.2 Operasional Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor basis dan tenaga kerja di Provinsi Riau.

#### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika diantaranya sebagai berikut:

- a. PDRB Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha 2011-2017.
- b. PDB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha 2011-2017.

#### 3.4 Populasi dan Sampel

Karena penelitian ini menggunakan data-data sekunder maka populasi dan sampel tidak digunakan. Data diperoleh dari kumpulan-kumpulan hasil penelitian yang dilakukan oleh instansi pemerintahan provinsi riau yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam menganalisa dan menghimpun data atau bahan yang penulis butuhkan untuk penelitian ini, maka penulis melakukan metode dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data sekunder, dengan mengumpulkan dan mempelajari data atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### 3.6 Analisa Data

Untuk menganalisa data dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif yaitu untuk mengetahui sektor mana yang merupakan sektor basis di Provinsi Riau.

#### 3.6.1 Metode Location Quotient

Analisis sektor unggulan dilakukan dengan membandingkan besarnya peranan suatu sektor di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut secara nasional. Variabel yang digunakan adalah nilai tambah (tingkat pendapatan). Untuk lebih jelas penjelasan diatas maka disajikan dengan rumus sebagai berikut :

$$LQ_i = \frac{v_i/v_t}{V_i/V_t}$$

Dimana :  $LQ_i$  = Nilai LQ Sektor i.

$V_i$  = Pendapatan (PDRB) sektor ke 1 Provinsi Riau.

$V_t$  = Total PDRB Provinsi Riau.

$V_i$  = PDB sektor ke Nasional.

$V_t$  = Total PDB Nasional.

### 3.6.2 Elastisitas Tenaga Kerja

Dalam menganalisa daya serap tenaga kerja di masing-masing sektor yang telah di paparkan sebelumnya, maka dilakukan hubungan antara pertumbuhan tenaga kerja di Provinsi Riau dengan pertumbuhan Produk Regional Bruto pada sektor basis Provinsi Riau yang dikenal dengan elastisitas tenaga kerja yang dapat dirumuskan menggunakan metode Location Quotient seperti berikut :

$$\text{Elastisitas T.K} = \frac{\% \text{ Pertumbuhan Tenaga Kerja Basis}}{\% \text{ Pertumbuhan Sektor Basis}}$$

Atau:

$$E = \frac{G_n}{G_y}$$

Dimana : E = Elastisitas tenaga kerja.

$G_n$  = Pertumbuhan tenaga kerja basis Provinsi Riau.

$G_y$  = Pertumbuhan sektor basis Provinsi Riau (PDRB).

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

#### 4.1. Letak dan Keadaan Geografis Provinsi Riau

Provinsi Riau terdiri dari daerah daratan dan perairan, dengan luas area sebesar 8.915.016 Hektar. Disamping itu didaerah lautan yang berbatasan dengan negara lain diperkirakan luas daerah Zona Ekonomi Eksklusif adalah 379.000 km<sup>2</sup>. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak antara 01005'00'' Lintang Selatan sampai 02025'00'' Lintang Utara atau antara 100000'00'' Bujur Timur sampai 105005'00'' Bujur Timur.

Di daerah daratan terdapat 15 Sungai, diantaranya ada 4 Sungai yang mempunyai arti penting sebagai prasarana penghubung seperti Sungai Siak (300 km) dengan kedalaman 8-12 m, Sungai Rokan (400 km) dengan kedalaman 6-8 m, Sungai Kampar (400 km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m dan Sungai Indragiri (500 m) dengan kedalaman 6-8 m. Ke 4 Sungai yang membelah dari pegunungan dataran tinggi. Bukit Barisan bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu dipengaruhi pasang surut laut. Batas-batas Daerah Riau adalah:

- Sebelah Utara : Selat Singapura dan Selat Malaka serta Provinsi Sumatra Utara.
- Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Selat Berhala serta Sumatra Barat.
- Sebelah Timur : Laut Cina Selatan dan Provinsi Kepulauan Riau serta Selat Malaka
- Sebelah Barat : Provinsi Sumatra Barat dan Provinsi Sumatra Utara.

Sedangkan batas-batas Kabupaten/Kota dalam Provinsi Riau adalah:

1. Kabupaten Kuantan Singingi :

Sebelah Utara : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Palalawan.

Sebelah Selatan : Provinsi Jambi .

Sebelah Barat : Provinsi Sumatra Barat.

Sebelah Timur : Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Kabupaten Indragili Hulu :

Sebelah Utara : Kabupaten Palalawan.

Sebelah selatan : Provinsi Jambi.

Sebelah Barat : Kabupaten Kuantan Singingi.

Sebelah Timur : Kabupaten Indragili Hilir.

3. Kabupaten Indragili Hilir :

Sebelah Utara : Kabupaten Palalawan.

Sebelah Selatan : Provinsi Jambi.

Sebelah Barat : Kabupaten Indragiri Hulu.

Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau.

4. Kabupaten Palalawan :

Sebelah Utara : Kabupaten Bengkalis.

Sebelah Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi, Indragili Hulu.

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.

Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau.

5. Kabupaten Siak :

Sebelah Utara : Kabupaten Bengkalis.

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Palalawan.

Sebelah Barat : Kota Pekanbaru.

Sebelah Timur : Kabupaten Kepulauan Meranti.

6. Kabupaten Kampar :

Sebelah Utara : Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.

Sebelah Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi.

Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatra Barat.

Sebelah Timur : Kabupaten Palalawan Kabupaten Siak.

7. Kabupaten Rokan Hulu :

Sebelah Utara : Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatra Utara.

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar.

Sebelah Barat : Provinsi Sumatra Barat.

Sebelah Timur : Kabupaten Kampar.

8. Kabupaten Bengkalis :

Sebelah Utara : Selat Malaka.

Sebelah Selatan : Kabupaten Siak.

Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai.

Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau.

9. Kabupaen Rokan Hilir :

Sebelah Utara : Provinsi Sumatra Utara dan Selat Malaka.

Sebelah Selatan : Kabupaten Bengkalis.

Sebelah Barat : Provinsi Sumatra Utara.

Sebelah Timur : Kota Dumai.

10. Kabupaten Kepulauan Meranti :

Sebelah Utara : Selat Malaka dan Kabupeten Bengkalis.

Sebelah Selatan : Kabupaten Siak.

Sebelah Barat : Kabupaten Siak.

Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau.

11. Kota Pekanbaru :

Sebelah Utara : Kabupaten Siak.

Sebelah Selatan : Kabupaten Palalawan.

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar.

Sebelah Timur : Kabupaten Palalawan.

12. Kota Dumai :

Sebelah Utara : Kabupaten Bengkalis.

Sebelah Selatan : Kabupaten Bengkalis.

Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hilir.

Sebelah Timur : Kabupaten Bengkalis.

Daerah Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten (Kuantan Sengingi, Indragili Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti) dan 2 Kota yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Tiap Kabupaten dikepalai oleh seorang Bupati dan Kota oleh seorang Walikota. Dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau pada Juni Tahun 2013 terdapat 164 Kecamatan yang dikepalai oleh seorang Camat dan 1.836 Kelurahan/Desa yang dikepalai oleh Lurah/Kepala Desa.

Berikut ini disajikan data mengenai banyaknya Kecamatan dan Kelurahan//Desa menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Tabel 4.1 : Banyak Kecamatan Dan Kelurahan/Desa Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2016.

NO	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	Kuantan Singingi	15	229
2	Indragiri Hulu	14	194
3	Indragiri Hilir	20	236
4	Pelalawan	12	118
5	Siak	14	131
6	Kampar	21	245
7	Rokan Hulu	16	153
8	Bengkalis	8	155
9	Rokan Hilir	16	183
10	Kepulauan Meranti	9	101
11	Pekanbaru	12	58
12	Dumai	7	33
Jumlah		164	1.836

Sumber : BPS Provinsi Riau Dalam Angka, 2017

Jumlah Kecamatan yang ada di Provinsi Riau adalah sebanyak 164 Kecamatan dan jumlah Kelurahan/Desa sebanyak 1.836 Kelurahan/Desa. Kabupaten/Kota yang paling banyak Kecamatannya adalah Kabupaten Kampar dengan 21 Kecamatan. Kabupaten/Kota yang paling sedikit Kecamatannya adalah Kota Dumai dengan jumlah 7 Kecamatan. Sedangkan jumlah Kelurahan/Desa yang paling banyak adalah Kabupaten Kampar dengan jumlah 245 Kelurahan/Desa. Dan selanjutnya jumlah kelurahan/Desa yang paling sedikit adalah Kota Dumai dengan jumlah 33 Kelurahan/Desa.

## 4.2. Iklim dan Curah Hujan

Daerah Riau beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 1700-4000 mm per tahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Daerah yang paling sering ditimpa hujan selama tahun 2012 adalah Kota Pekanbaru 214 kali, Kabupaten Rokan Hulu 191 hari. Kota Dumai 163 kali, Kabupen Kampar 147 kali dan Kabupaten Kuantan Sengingi dengan jumlah hari hujan 140 kali.

Jumlah curah hujan tertinggi pada tahun 2012 terjadi di Kabupaten Kuantan Sengingi dengan curah hujan sebesar 4.081,0 mm, disusul Kabupaten Kampar sebesar 2.846,1 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 1.722,0 mm.

Selanjutnya menurut catatan Stasiun Metereologi Simpang Tiga, suhu udara rata-rata di Kota Pekanbaru tahun 2012 menunjukkan 26,0 celcius dengan suhu maksimal 35,1 celcius dan suhu minimum 21,8 celcius.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru juga mengeluarkan data jumlah titik api. Pada tahun 2012, jumlah titik api paling banyak terdapat di Kabupaten Palalawan dengan 922 titik api, disusul Kabupaten Rokan Hilir dengan 712 titik api serta Kabupaten Inragiri Hulu dengan 600 titik api. Dan yang paling sedikit di Kota Pekanbaru dengan 9 titik api.

## 4.3. Kependudukan Provinsi Riau

### 4.3.1. Penduduk dan Perkembanganya

Penduduk Provinsi Riau terdiri dari berbagai suku dan latar belakang sosial, ekonomi, agama serta kebudayaan yang beraneka ragam. Sebagian besar Penduduk Provinsi Riau adalah kaum pendatang yang terdiri dari berbagai suku seperti : Minang kabau, Jawa, Batak, bahkan China dan lain sebagainya.

Penduduk merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian. Tanpa penduduk perekonomian tidak dapat berjalan dengan baik, tentunya semua itu perlu dukungan atau sokongan dari berbagai sektor misalkan sektor pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Dalam usaha meningkatkan produksi dan pengembangan kegiatan ekonomi, penduduk memegang peranan penting di dalamnya. Karena dari penduduk ini tersedianya tenaga kerja, tenaga ahli dan para pengusaha yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Sebagai akibat dari berbagai fungsi ini penduduk bukan saja salah satu faktor produksi, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah untuk mengembangkan teknologi dan mengorganisasikan pengguna faktor produksi. Selain itu penduduk yang banyak merupakan bangsa pasar yang sangat luas untuk memasarkan hasil produksi. Dengan kata lain penduduk memegang peran ganda dalam perekonomian.

Tingkat pengembangan penduduk adalah mutlak untuk diketahui sebagai pedoman dalam rancangan maupun sebagai evaluasi terhadap keberhasilan dan kegagalan pembangunan. Penduduk Provinsi Riau telah mencapai lebih dari 6.344.402 jiwa tahun 2016, hal ini menunjukkan suatu tingkat pertumbuhan yang pesat, sehingga Provinsi Riau sudah dikategorikan sebagai Provinsi yang berkembang jika ditinjau dari jumlah penduduk dan berdasarkan pada biro pusat

statistik Provinsi Riau, jumlah penduduk tahun 2015 laki-laki sebanyak 3.257.561 jiwa, perempuan 3.086.841 jiwa. Untuk lebih jelas mengenai jumlah penduduk menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat dari table 3 dibawah ini :

Table 4.2 : Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2016

NO	Kabupaten/Kota	Penduduk (Jiwa)
1	Kuantan Singingi	314.276
2	Indragiri Hulu	409. 431
3	Indragiri Hilir	703. 734
4	Pelalawan	396. 990
5	Siak	440. 841
6	Kampar	793. 005
7	Rokan Hulu	592. 278
8	Bengkalis	543. 987
9	Rokan Hilir	644. 680
10	Kepulauan Meranti	181. 095
11	Pekanbaru	1. 038. 118
12	Dumai	285. 967
Jumlah		6. 344 .402

*Sumber: BPS Provinsi Riau Dalam Angka Tahun, 2017*

Dari table 4.2. diatas dapat dilihat Kabupaten/Kota yang jumlah penduduknya terbesar adalah kota Pekanbaru yaitu sebanyak 1. 038. 118 jiwa dan jumlah penduduk terkecil adalah Kabupaten Meranti yaitu sebesar 181. 095 jiwa. Sebagaimana perkembangan penduduk, penyebaran menurut pembagian wilayah Kabupaten juga berubah beserta kepadatannya. Karena luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten tidak sama maka ada Kabupaten yang padat dan ada yang jarang penduduknya. Dengan adanya pertambahan dan pengurangan jumlah penduduk yang disebabkan oleh faktor-faktor Migrasi, Natalis, dan Mortalitas terjadilah perubahan penduduk. Perubahan penduduk inilah yang menyebabkan akibat-akibat yang menyangkut segi fasilitas kehidupan dan segi sosial ekonomi.

Dan dapat dilihat bahwa pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap jumlah penduduk antara kabupaten/kota menunjukkan angka pertumbuhan yang berbeda-beda, yang terbesar memberi pengaruh terhadap pertumbuhan penduduk adalah faktor Migrasi.

#### 4.3.2. Penduduk Menurut Mata Pencarian

Masalah kependudukan selalu berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan. Salah satu contoh adalah tingkat pertumbuhan penduduk akan berpengaruh juga pada tingginya penyediaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diikuti dengan penyediaan kesempatan kerja yang cukup akan menimbulkan masalah pengangguran dan setengah pengangguran. Sesuai dengan ritme kehidupan masyarakat yang dinamis, maka dalam hal lapangan usaha yang digeluti terhadap keanekaragaman.

Keanekaragaman dalam lapangan usaha inilah yang mengerakan aktifitas ekonomi yang ada dimasyarakat, begitu juga halnya yang terjadi pada Provinsi Riau. Masyarakatnya mengeluti berbagai bidang usaha dalam menjalankan kehidupan antara lain sektor pertanian , pertambangan industri, gas dan air, konstruksi, perdagangan, komunikasi, keuangan dan jasa lainnya. Keanekaragaman lapangan usaha ini yang akan memberikan alternatifpilihan yang lebih banyak bagi masyarakat untuk lebih berusaha dalam rangka mendapatkan pendapatan yang nantinya digunakan dalam kehidupannya.

Keanekaragaman lapangan usaha yang ada di Provinsi Riau ini disadari karena adanya potensial dari Provinsi Riau itu sendiri yang mempunyai kemampuan dibidang ekonomi dan sumber daya alam. Sehingga kegiatan

ekonomi masyarakat hanya terpaku dalam satu bidang usaha yang dominan. Masyarakat sendiri dalam menjalankan kegiatan usaha ini, diharapkan adanya skill, manajemen serta tenaga usahawan yang terampil, agar aktifitas lapangan usaha yang merupakan mata pencarian biasa terlaksana dengan optimal, efektif dan efisien. Secara keseluruhan lapangan usaha yang diguluti oleh masyarakat Provinsi Riau sebagai lapangan kerja dalam mencari nafkah dapat dilihatnya dalam table berikut :

Tabel 4.3 : Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu menurut Lapangan Usaha Utama, Tahun 2015

	Lapangan Usaha	Tahun 2015
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	46,09
2	Pertambangan dan Penggalian	1,32
3	Industri	4,90
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	0,12
5	Konstruksi	4,84
6	Perdagangan Rumah Makan dan Akomodasi	16,04
7	Transortasi, Pergudangan, dan Komunikasi	3,85
8	Lembaga Keuangan	2,98
9	Jasa Kemasyarakatan	19,85
	Jumlah	100

Sumber : BPS Provinsi Riau Dalam Angka Tahun, 2015

Dari table diatas terlihat bahwa penduduk Provinsi Riau terutama bekerja pada sektor Pertanian sebesar 46,09% dan diikuti oleh persentase yang terendah adalah listrik, air dan gas sebesar 0,12% namun cukup berarti bagi masyarakat yang ada di Provinsi Riau. Salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah dapat digunakan dan dilihat dari pendapatan penduduk daerah tersebut begitu juga dengan mata pencarian yang mereka geluti.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Analisa Sektor Basis di Provinsi Riau

##### 5.1.1 Analisa Location Quotient (LQ) untuk Penentu Sektor Basis

Menurut Tarigan (2004:207) sektor basis adalah sektor yang tidak terkait dengan kondisi ekonomi setempat dan bisa berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah, atas dasar tersebut, salah satu dasar yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan melebihi pertumbuhan alami perekonomian wilayah tersebut disebut dengan sektor basis.

Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk mengidentifikasi apakah suatu sektor atau subsektor ekonomi tergolong kategori basis atau non basis adalah dengan menggunakan metode Location Quotient (LQ), yaitu dengan membandingkan antara pangsa relatif pendapatan (tenaga kerja) sektor *i* pada tingkat wilayah terhadap pendapatan total wilayah dengan pangsa relatif pendapatan sektor *i* pada tingkat nasional terhadap pendapatan total nasional. Apabila nilai LQ suatu sektor ekonomi  $\geq 1$  maka sektor ekonomi tersebut merupakan sektor basis dalam perekonomian daerah yang bersangkutan, sedangkan bila nilai LQ suatu sektor atau subsektor ekonomi  $< 1$  maka sektor atau subsektor ekonomi tersebut merupakan sektor non basis dalam perekonomian daerah yang bersangkutan.

Adapun hasil dari analisa Location Quotient untuk mengidentifikasi sektor apa saja yang menjadi sektor basis di Provinsi Riau untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah berikut (Perhitungan lihat lampiran 1)

Tabel 5.1 : Location Quotient (LQ) Provinsi Riau 2011-2017

No	Lapangan Usaha	Location Quotient (LQ)							Keterangan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	1,23	1,15	1,14	1,18	1,3	1,35	1,41	Basis
2	Pertambangan dan Penggalian	2,68	2,92	3,48	3,22	3,21	3,09	2,69	Basis
3	Industri	0,82	0,77	0,75	0,79	0,9	0,95	0,99	Non Basis
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	0,12	0,12	0,1	0,1	0,12	0,12	0,13	Non Basis
5	Konstruksi	0,56	0,54	0,53	0,54	0,62	0,63	0,66	Non Basis
6	Perdagangan, Rumah Makan, dan Akomodasi	0,4	0,41	0,38	0,46	0,53	0,56	0,59	Non Basis
7	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	0,14	0,13	0,13	0,12	0,13	0,13	0,12	Non Basis
8	Lembaga Keuangan	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	Non Basis
9	Jasa Kemasyarakatan	0,1	0,1	0,1	0,11	0,13	0,13	0,14	Non Basis

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Tahun, 2018 (diolah)

Dari tabel diatas nilai Location Quotient (LQ) yang diperoleh dapat dilihat yang menjadi sektor basis adalah sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan serta sektor Pertambangan dan Penggalian. Selama 7 tahun maka sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan menduduki peringkat pertama dengan nilai LQ sebesar 3,04, peringkat kedua ditempati oleh sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,25. Sedangkan sektor Non basis adalah sektor Industri sebesar 0,85, sektor Listrik, Gas, dan Air Minum sebesar 0,12, sektor Konstruksi sebesar 0,58, sektor Perdagangan, Rumah Makan, dan

Akomodasi sebesar 0,48, sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi sebesar 0,13, sektor Lembaga Keuangan sebesar 0,17, dan terakhir sektor Jasa Kemasyarakatan sebesar 0,12.

Sektor basis dimana besarnya LQ setiap sektor tersebut adalah  $> 1$  hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Tarigan dimana apabila  $LQ > 1$  maka sektor tersebut sektor basis. Walaupun sektor basis merupakan yang paling potensial untuk dikembangkan dan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, sektor non basis harus dikembangkan untuk menjadi sektor basis baru ditunjang dengan adanya sektor basis yang telah ada.

#### 5.1.2 Perbandingan PDRB Persektor di Provinsi Riau

Setelah mengetahui sektor-sektor mana yang menjadi sektor basis di Provinsi Riau kita dapat melihat faktor-faktor yang menyebabkan sektor basis tersebut, adapun yang menjadi sektor basis di Provinsi Riau ada dua yaitu sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan serta sektor Pertambangan dan Penggalian, bukan berarti sektor basis yang selalu menjadi sorotan utama bagi perkembangan atau perhatian dalam pembangunan ekonomi daerah, tetapi sektor yang lain juga ikut serta untuk dikembangkan menjadi sektor basis yang baru.

Untuk melihat faktor-faktor penentu sektor basis di Provinsi Riau dapat kita lihat dari nilai perbandingan PDRB yang dicapai daerah dari waktu ke waktu seperti juga hal yang sama dengan daerah lain. Dan untuk lebih jelas apa faktor-faktor penentu sektor basis di Provinsi Riau dapat kita lihat pada tabel 5.2 dibawah ini agar jelas.

Tabel 5.2 : Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2011-2017

No	Lapangan Usaha	PDRB Provinsi Riau ADHB Menurut Lapangan Usaha (Triliun Rupiah)						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	99,56	106,54	115,44	133,55	144,22	156,83	166,77
2	Pertambangan dan Penggalian	189,90	235,44	256,40	268,82	201,80	191,97	182,97
3	Industri	107,24	115,05	124,88	141,87	155,69	168,24	178,59
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08
5	Konstruksi	30,65	34,84	38,27	45,44	51,67	57,00	61,70
6	Perdagangan, Rumah Makan, dan Akomodasi	32,90	37,35	40,29	52,87	57,95	63,96	69,03
7	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	2,88	3,31	3,76	4,46	5,19	5,64	6,04
8	Lembaga Keuangan	3,42	4,25	4,93	5,43	5,66	6,14	6,25
9	Jasa Kemasyarakatan	0,61	0,71	0,79	0,96	1,18	1,22	1,31
	Jumlah	467,21	537,55	584,81	653,46	623,42	651,07	672,74

Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Riau Tahun, 2018 (diolah)

Dilihat dari PDRB persektor pada tahun 2017 sektor Pertambangan dan Penggalian adalah sektor yang paling besar dalam memberikan sumbangan terbesar yaitu 182,97 triliun rupiah, ini dikarenakan sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan dalam output yang dihasilkan.

Dari sektor Pertambangan dan Penggalian masih merupakan primadona dalam pembangunan prekonomian Provinsi Riau, dimana Provinsi Riau yang terkenal dengan Provinsi penghasil minyak yang besar, walaupun akhir-akhir sumbangan dari sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan, tetapi masih menjadi penyumbang terbesar di Provinsi Riau dalam segi ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kuncoro (2004:127) yang dimana tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan

ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah, dan antar sektor.

Sektor pada nomor urut kedua terbesar dalam memberikan kontribusi PDRB yaitu sektor Industri yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2011-2017. Peningkatan tidak terlalu signifikan tetapi terus mengalami peningkatan tanpa pernah turun. Hal ini disebabkan dari sektor Industri sendiri di Provinsi Riau sangat berkembang pesat, mengingat dari pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau dan juga pembangunan wilayah di Provinsi Riau yang sedang digencarkan. Hal ini tentunya berdampak baik bagi sektor Industri sendiri, sehingga perkembangan sektor Industri menjadikan sektor tersebut berkontribusi besar terhadap PDRB Provinsi Riau.

Sektor nomor tiga yang memberikan sumbangan terhadap PDRB yaitu sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan yang paling besar pada tahun 2017 sebesar 166,77 triliun rupiah. Hal ini sama seperti sektor Industri yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, selain itu sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan perikanan ini sangat banyak menyerap tenaga kerja, bahkan merupakan sektor terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau.

Dengan berkembang pesatnya sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan di Provinsi Riau didorong oleh masih banyaknya atau semakin maraknya pembukaan lahan perkebunan yang baru, selain itu juga Provinsi Riau juga merupakan Provinsi yang terkenal dengan perkebunan kelapa sawit yang begitu luas.

Sektor ekonomi yang memberikan sumbangan nomor empat pada PDRB adalah sektor Perdagangan, Rumah Makan, dan Akomodasi yang pada tahun 2017 memberikan sumbangan terbesarnya sebesar 69,09 triliun rupiah. Ini disebabkan oleh subsektor dari Perdagangan yang terus meningkat, baik itu di perkotaan maupun pedesaan, selain itu subsektor dari rumah makan dan akomodasi yang menjadi tunjangan dalam kontribusi sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Akomodasi terhadap PDRB Provinsi Riau.

Sektor nomor lima yang memberikan sumbangan PDRB yaitu sektor konstruksi yang selama 7 tahun memberikan kontribusi terbesar pada tahun 2017 sebesar 61,70 triliun rupiah. Selama 7 tahun selalu mengalami peningkatan hal ini disebabkan karena pembangunan yang selalu terjadi di Provinsi Riau. Pada saat ini di Provinsi Riau sedang tingginya dalam pembangunan Konstruksi baik itu di desa, kabupaten maupun kota. Hal ini menjadikan pendorong dalam kontribusi sektor Konstruksi pada PDRB.

Sektor ekonomi yang memberikan sumbangan nomor enam pada PDRB yaitu sektor lembaga keuangan. Kontribusi terbesar selama 7 tahun pada tahun 2017 sebesar 6,25 triliun rupiah. Dengan berkembangnya perekonomian Provinsi Riau tentunya juga didukung oleh lembaga-lembaga keuangan yang ada, hal ini juga pada dasarnya perkembangan dari lembaga keuangan yang menyebar hampir seluruh daerah yang ada di Provinsi Riau.

Sektor ekonomi yang memberikan sumbangan PDRB nomor tiga terendah adalah sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi sebesar 6,04 triliun rupiah pada tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengalokasian dalam

bidang atau sektor tersebut. Selain itu di Provinsi Riau masih dikatakan minim dalam sektor transportasi. Hal ini menjadikan sulit berkembangnya sektor tersebut. Yang nantinya perlu adanya perhatian khusus bagi pemerintah dalam menanggapi sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi ini.

Sektor yang memberikan sumbangan PDRB nomor dua terkecil yaitu sektor Jasa Kemasyarakatan. Pada tahun 2017 sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 1,31 triliun rupiah yang merupakan kontribusi terbesar selama 7 tahun terakhir. Pelayanan kesehatan di Provinsi Riau sudah lumayan cukup, tetapi dalam segi ekonomi memang masih kurang dalam kontribusinya dan tidak sebesar seperti sektor-sektor yang lainnya

Dan sektor ekonomi yang terendah memberikan sumbangan PDRB yaitu sektor Listrik, Gas dan Air Minum. Hal ini sudah tidak dipungkiri lagi sangat minimnya pengelolaan dari sektor ini di Provinsi Riau, selain itu dari Gas di Provinsi Riau juga hanya sedikit, dan sektor Listrik masih banyak tergantung kepada pembangkit listrik yang ada di Provinsi Sumatra Barat. Sehingga kurang kontribusi dari sektor ini kepada PDRB Provinsi Riau.

## 5.2 Peranan Sektor Basis Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Riau

### 5.2.1 Elastisitas Tenaga Kerja Provinsi Riau

Untuk mengetahui peranan sektor basis terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau maka dilakukan hubungan antara pertumbuhan tenaga kerja dengan pertumbuhan PDRB pada sektor basis di Provinsi Riau yang dikenal dengan Elastisitas Tenaga Kerja.

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh guna menghitung tingkat elastisitas tenaga kerja sektor basis yang pertama, menghitung persentase pertumbuhan tenaga kerja setiap sektor, yang kedua menghitung persentase pertumbuhan PDRB setiap sektor, yang ketiga membandingkan persentase PDRB dengan persentase tenaga kerja.

Tahap pertama yang menghitung pertumbuhan tenaga kerja setiap sektor, pertumbuhan tenaga kerja setiap sektor dapat dilihat pada tabel 10 dibawah ini.

Tabel 5.3 : Pertumbuhan Tenaga Kerja setiap Sektor di Provinsi Riau 2011-2017

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan Tenaga Kerja Provinsi Riau (%)						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	12,07	-1,2	3,12	0,79	-2,42	6,45	-3,98
2	Pertambangan dan Penggalian	19,23	18,58	-2,73	8,56	-18,53	7,81	-30,11
3	Industri	14,91	0,47	8,63	3,06	-7	37,11	-12,71
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	47,95	-20,78	-16,69	69,22	-51,12	225,23	-70,58
5	Konstruksi	0,25	-1,92	10,46	-6,29	15,16	8,02	-2,09
6	Perdagangan, Rumah Makan, dan Akomodasi	20,21	0,37	0,21	7,39	-1,75	-1	18,16
7	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-6,82	1,85	-6,41	2,86	5,04	20,5	-1,36
8	Lembaga Keuangan	86,57	25,53	-10,62	-10,38	17,36	-1,1	9,55
9	Jasa Kemasyarakatan	1,82	-8,83	10,7	-1,82	17,21	9,93	3,72

Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Riau Tahun,2018 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pertumbuhan tenaga kerja pada sektor-sektor mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, pada tahun 2011 pertumbuhan tenaga kerja tertinggi dipegang oleh sektor Lembaga Keuangan

sebesar 86,57%, sedangkan yang mengalami penurunan yang tertinggi adalah sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi sebesar -6,82%.

Sedangkan pada akhir tahun pertumbuhan tenaga kerja Provinsi Riau yang terbesar oleh sektor Perdagangan, Rumah Makan, dan Akomodasi sebesar 18,16%, dan pertumbuhan tenaga kerja yang terendah pada sektor Listrik, Gas, dan Air Minum sebesar -70,58%, dengan kata lain mengalami penurunan sebesar 70,58%.

Tahap kedua yaitu menghitung pertumbuhan PDRB setiap sektor di Provinsi Riau dari data tabel 5.4 dibawah terlihat bahwa perkembangan PDRB setiap sektor nya mengalami fluktuasi setiap tahunnya, adapun pertumbuhan PDRB tertinggi pada tahun 2017 adalah sektor Perdagangan, Rumah Makan, dan Akomodasi sebesar 6,37%, sedangkan yang terendah pada sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar -6,25%.

Tabel 5.4 : Pertumbuhan PDRB Setiap Sektor di Provinsi Riau Tahun 2011-2017

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB Provinsi Riau (%)						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	3,46	3,82	4,4	6,15	0,43	3,98	5,28
2	Pertambangan dan Penggalian	3,11	-1,43	-4,44	-5,24	-6,95	-4,22	-6,25
3	Industri	8,47	6,83	6,95	5,63	3,63	4,61	5,51
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	1,21	0,87	0,64	1,06	2,41	-0,45	4,75
5	Konstruksi	10,49	3,7	2,65	8,46	6,39	4,92	5,92
6	Perdagangan, Rumah Makan, dan Akomodasi	7,48	10,98	5,59	3,96	1,49	4,88	6,37
7	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	7,1	11,19	6,76	7,99	5,38	3,06	4,33
8	Lembaga Keuangan	8,93	13,45	9,83	4,93	0,35	5,65	-2,24
9	Jasa Kemasyarakatan	8,59	9,19	8,51	8,4	9,94	0,56	5,82

Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Riau Tahun, 2018

Tahap yang terakhir yaitu menghitung perbandingan persentase pertumbuhan tenaga kerja setiap sektor dengan persentase pertumbuhan PDRB setiap sektor di Provinsi Riau.

Dimana pada lampiran 3 yang menjadi elastisitas tenaga kerja sektor basis yang paling tinggi pada tahun 2011 diberikan oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 6,18%, yang artinya jika terjadi perubahan PDRB sektor basis pertambangan dan penggalian sebesar 1% maka akan mengakibatkan perubahan pertumbuhan tenaga kerja sektor pertambangan dan penggalian sebesar 6,18%. Sedangkan yang terendah adalah sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan sebesar 3,49%, yang artinya jika terjadi perubahan PDRB sektor basis pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan sebesar 1% maka akan mengakibatkan perubahan pertumbuhan tenaga kerja sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan sebesar 3,49%.

Pada akhir tahun 2017 elastisitas tenaga kerja tertinggi sektor basis diperoleh oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 4,82%, yang artinya jika terjadi perubahan PDRB sektor basis pertambangan dan penggalian sebesar 1% maka akan mengakibatkan perubahan pertumbuhan tenaga kerja sektor pertambangan dan penggalian sebesar 4,82%. Sedangkan elastisitas terendah diberikan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan sebesar -0,75%, yang artinya jika terjadi perubahan PDRB sektor basis pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan sebesar 1%, maka akan mengakibatkan penurunan pertumbuhan tenaga kerja sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan sebesar 0,75%.

### 5.2.2 Peranan Sektor Basis Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Elastisitas Kesempatan Kerja di Provinsi Riau

Setelah mengetahui sektor basis dan angka elastisitas yang terdapat pada Provinsi Riau pada tahun 2011-2017 kemudian untuk melanjutkan penelitian peranan sektor basis terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau.

Tabel 5.5 : Rekapitulasi Perhitungan Elastisitas Tenaga Kerja Provinsi Riau Tahun 2017

No	Sektor	Tenaga Kerja (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Elastisitas (%)
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	-3,98	5,28	-0,75
2	Pertambangan dan Penggalian	-30,11	-6,25	4,82

Sumber : BPS Provinsi Riau Tahun, 2018 (data diolah)

Berdasarkan dari hasil perhitungan elastisitas tenaga kerja Provinsi Riau diatas, dapat diketahui sektor ekonomi mana yang memiliki nilai elastisitas tenaga kerja besar dari satu ( $>1$ ) dan kecil dari satu ( $<1$ ) yaitu :

#### A. Peranan sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau

Angka pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2017 angka pertumbuhan ekonominya sebesar 5,28% dengan angka elastisitas -0,75%. Dimana dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan tidak elastis antara pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan dengan jumlah tenaga kerja yang diserapnya sebesar -0,75 dimana angka tersebut kurang dari 1 ( $-0,75 < 1$ ) yang artinya apabila perekonomian sektor pertanian, perkebunan,

kehutanan, dan perikanan di Provinsi Riau mengalami kenaikan 1% maka jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan di Provinsi Riau mengalami penurunan sebesar 0,75%.

Dengan demikian terdapat hubungan yang tidak elastis antara pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada sektor tersebut tidak diikuti dengan jumlah penyerapan tenaga kerja yang tinggi pula. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi yang terjadi di Provinsi Riau pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan pada saat ini.

#### B. Peranan Sektor Pertambangan dan Penggalian Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau

Angka pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2017 angka pertumbuhan ekonominya sebesar -6,25% dengan angka elastisitas sebesar 4,82% dimana dapat disimpulkan bahwa sektor listrik elastis antara pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian dengan jumlah tenaga kerja yang diserapnya sebesar 4,82% dimana angka tersebut besar dari 1 ( $4,82 > 1$ ) yang artinya apabila terjadi perubahan PDRB sektor pertambangan dan penggalian sebanyak 1% maka akan mengakibatkan perubahan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor pertambangan dan penggalian akan bertambah sebesar 4,82%.

Dengan demikian terdapat hubungan yang elastis di sektor pertambangan dan penggalian antara pertumbuhan ekonomi dengan jumlah tenaga kerja yang

diserapnya, karena pertumbuhan yang cukup tinggi pada sektor tersebut diikuti dengan jumlah penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi pula.

### 5.3 Pembahasan Hasil Penelitian Terhadap Teori

#### 5.3.1 Analisa Sektor Basis di Provinsi Riau

Dari hasil penelitian nilai Location Quotient (LQ) yang menjadi sektor basis adalah sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan serta sektor Pertambangan dan Penggalian. Selama 7 tahun maka sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan menduduki peringkat pertama dengan nilai LQ sebesar 3,04, peringkat kedua ditempati oleh sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,25. Sedangkan sektor Non basis adalah sektor Industri sebesar 0,85, sektor Listrik, Gas, dan Air Minum sebesar 0,12, sektor Konstruksi sebesar 0,58, sektor Perdagangan, Rumah Makan, dan Akomodasi sebesar 0,48, sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi sebesar 0,13, sektor Lembaga Keuangan sebesar 0,17, dan terakhir sektor Jasa Kemasyarakatan sebesar 0,12.

Hal ini sesuai dengan teori oleh W. Richardson dalam (Tambunan, 2003:47) Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk mengidentifikasi apakah suatu sektor atau subsektor ekonomi tergolong kategori basis atau non basis adalah dengan menggunakan metode Location Quotient (LQ), yaitu dengan membandingkan antara pangsa relatif pendapatan (tenaga kerja) sektor i pada tingkat wilayah terhadap pendapatan total wilayah dengan pangsa relatif pendapatan sektor i pada tingkat nasional terhadap pendapatan total nasional. Apabila nilai LQ suatu sektor ekonomi  $\geq 1$  maka sektor ekonomi tersebut merupakan sektor basis dalam perekonomian daerah yang bersangkutan,

sedangkan bila nilai LQ suatu sektor atau subsektor ekonomi  $< 1$  maka sektor atau subsektor ekonomi tersebut merupakan sektor non basis dalam perekonomian daerah yang bersangkutan.

logika dasar LQ adalah teori basis ekonomi yang intinya adalah karena industri basis menghasilkan barang-barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan keluar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Selanjutnya, adanya arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi (*consumption*, C) dan investasi (*investment*, I) di daerah tersebut. Hal tersebut selanjutnya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan terhadap industri basis, tetapi juga menaikkan permintaan akan industri non basis (lokal). Kenaikan permintaan (*demand*) ini akan mendorong kenaikan investasi pada industri yang bersangkutan dan juga industri lain (Robinson Tarigan, 2005:97).

### 5.3.2 Peranan Sektor Basis Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Riau

Menurut Subandi (2008:114) Hasil perhitungan elastisitas ini mempunyai beberapa kriteria :

4. Jika E besar 1 atau ( $E > 1$ ) maka dikatakan elastis.
5. Jika E sama dengan 1 atau ( $E = 1$ ) maka dikatakan unitary elastis.
6. Jika E kurang 1 atau ( $E < 1$ ) maka dikatakan tidak elastis.

Berdasarkan dari hasil perhitungan elastisitas tenaga kerja Provinsi Riau diatas, dapat diketahui sektor ekonomi mana yang memiliki nilai elastisitas tenaga kerja besar dari satu ( $>1$ ) dan kecil dari satu ( $<1$ ) yaitu sektor pertanian,

perkebunan, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2017 angka pertumbuhan ekonominya sebesar 5,28% dengan angka elastisitas -0,75%. Dimana dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan tidak elastis antara pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, perkebuna, kehutanan, dan perikanan dengan jumlah tenaga kerja yang diserapnya sebesar -0,75 dimana angka tersebut kurang dari 1 (  $-0,75 < 1$  ).

Serta sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2017 angka pertumbuhan ekonominya sebesar -6,25% dengan angka elastisitas sebesar 4,82% dimana dapat disimpulkan bahwa sektor listrik elastis antara pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian dengan jumlah tenaga kerja yang diserapnya sebesar 4,82% dimana angka tersebut besar dari 1 (  $4,82 > 1$  )

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun faktor-faktor sektor basis di Provinsi Riau adalah sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, dan sektor pertambangan dan penggalian yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang ada pada Provinsi Riau dan diharapkan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. (lihat pada tabel 5.5).
2. Peranan terbesar dalam penyerapan tenaga kerja dari sektor basis di Provinsi Riau terdapat pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan yang memiliki tingkat pertumbuhan tenaga kerja sebesar -3,98% dengan angka PDRB sebesar 166.772,36 milyar rupiah. Pada tahun 2017 nilai perbandingan elastisitas tenaga kerja pada sektor ini sebesar -0,75%, yang mempunyai arti bahwa apabila pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan bertambah 1% maka jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan akan menurun sebesar 0,75%. Sedangkan peranan terbesar kedua dalam penyerapan tenaga kerja dari sektor basis di Provinsi Riau terdapat pada sektor pertambangan dan penggalian yang memiliki tingkat pertumbuhan tenaga kerja sebesar -30,11% dengan angka

PDRB 182.967,67 miliar rupiah. Pada tahun 2017 nilai perbandingan elastisitas tenaga kerja pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 4,28%, yang mempunyai arti bahwa apabila pertumbuhan ekonomi pada sektor pertambangan dan penggalian bertambah 1 % maka jumlahh tenaga kerja yang dapat diserap oleh sektor ini sebesar 4,28%. (lihat pada tabel 5.5).

## 6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Dapat diharapkan pada pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Riau hendak lebih mengembangkan sektor basis serta menggali potensi sumber daya yang ada, sehingga pada akhirnya akan lebih luas dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan rumah tangga, khususnya masyarakat Provinsi Riau.
2. Diharapkan dapat mengatasi setengah pengangguran dan produktifitas yang rendah, maka diperlukan kebijaksanaan yang berorientasi pada strategi pembangunan yang menekankan diberantasnya kemiskinan dan tumbuhnya lapangan pekerjaan.
3. Diharapkan dapat memberikan keunggulan komperatif didasarkan pada perbedaan kandungan sumber daya yang dimiliki maka perlu juga dilakukan kajian yang lebih di dasarkan pada unsur kreatifitas, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia di kombinasikan untuk menghasilkan produk yang mempunyai daya saing tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2018. RIAU dalam Angka. PEKANBARU: BPS.
- Darman. 2015. Skripsi: Analisis Sektor Unggulan dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kendari: Universitas Haluoleo.
- Jhingan. 2013, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*, UPP STIMIM YKPN, Yogyakarta.
- Limbong, Daud Lebok, 2009, *Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Tanah Toraja Tahun 1997-2006*. Universitas Hasanuddin Makassar.LP3S. Jakarta.
- Munir, Rozi, dan Budiarto, 2001, *Aspek Demografi Tenaga Kerja*, Akademi Persindo, Jakarta.
- Nanga, Muana, 2005, *Makro Ekonomi Teori, Masalah, dan Kebijakan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Putong, Iskandar, 2007, *Pengantar Mikro dan Makro*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Sukirno. 2006, *Ekonomi Pembangunan proses*, Masalah dan Dasar Kebijakan Presnadamedia Grup PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Subandi, 2008, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Sugianto. 2008. *Pajak dan Retribusi Daerah(Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*. PT. Grasindo, Jakarta.
- Suryana, 2000. *Ekonomi Pembangunan*, Alfabeta, Bandung.
- Soebroto, 1996, *Strategi Pembangunan, dan Perencanaan Tenaga Kerja*. Yogyakarta.
- Simanjuntak, Payman, 2002, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, LPFI-UI, Jakarta.
- Suparmoko, 2000, *Ekkonomi Pembangunan*, BPFE, Yogyakarta.

Tarigan, Robinson, 2005. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Edisi Revisi.  
Jakarta: Bumi Aksara.

Tambunan, Tulus, 2001, *Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Emperis*.  
Gahlian Indonesia, Jakarta.

Lampiran 1  
Perhitungan Location Quotient (LQ)  
Tahun 2011-2017

No	Lapangan Usaha	PDRB Provinsi Riau ADHB Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	99.561,48	106.538,79	115.444,55	133.550,01	144.218,91	156.825,88	166.772,36
2	Pertambangan dan Penggalian	189.902,42	235.437,55	256.395,34	268.819,88	201.796,80	191.970,57	182.967,67
3	Industri	107.243,25	115.048,88	124.879,98	141.874,68	155.685,92	168.241,90	178.589,42
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	58,95	63,38	62,2	65,79	72,06	75,56	80,95
5	Konstruksi	30.647,06	34.843,61	38.268,20	45.437,97	51.673,30	56.999,52	61.696,54
6	Perdagangan, Rumah Makan, dan Akomodasi	32.895,93	37.354,93	40.289,00	52.868,66	57.952,65	63.956,78	69.033,80
7	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	2.875,28	3.311,21	3.760,84	4.457,96	5.185,48	5.640,18	6.039,48
8	Lembaga Keuangan	3.416,36	4.253,65	4.925,50	5.430,50	5.664,92	6.141,36	6.254,33
9	Jasa Kemasyarakatan	612,05	705,87	787,62	955,16	1.176,04	1.224,30	1.314,85
	Jumlah	467.212,78	537.557,87	584.813,23	653.460,61	623.426,08	651.076,05	672.749,40

Lanjutan Lampiran 1

No	Lapangan Usaha	PDB Indonesia ADHB Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	1.058.245,30	1.152.262,10	1.083.141,80	1.409.655,70	1.555.207,00	1.671.330,30	1.785.880,70
2	Pertambangan dan Penggalian	924.813,40	1.000.307,60	785.016,30	1.039.423,00	881.694,10	890.868,30	1.028.772,20
3	Industri	1.704.250,50	1.848.150,90	1.774.097,30	2.227.584,00	2.418.891,70	2.545.203,50	2.739.415,00
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	6.208,80	6.603,80	6.587,10	7.840,60	8.546,30	8.942,50	9.720,30
5	Konstruksi	712.184,40	805.208,10	772.719,60	1.041.949,50	1.177.084,10	1.287.659,30	1.409.833,80
6	Perdagangan, Rumah Makan, dan Akomodasi	1.066.092,10	1.138.484,40	1.118.207,00	1.419.239,40	1.532.876,70	1.635.259,00	1.767.718,30
7	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	276.122,40	313.156,20	308.521,20	466.968,90	578.464,30	644.999,50	735.229,60
8	Lembaga Keuangan	270.586,30	320.534,30	306.432,20	408.438,80	464.399,90	520.087,50	571.128,50
9	Jasa Kemasyarakatan	76.404,90	86.235,40	84.518,40	109.147,20	123.191,50	132.544,60	144.966,50
	Jumlah	6.094.908,10	6.670.942,80	6.239.240,90	8.130.247,10	8.740.355,60	9.336.894,50	10.192.664,90

Lanjutan Lampiran 1

No	Lapangan Usaha	Location Quotient (LQ)						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	1,23	1,15	1,14	1,18	1,30	1,35	1,41
2	Pertambangan dan Penggalian	2,68	2,92	3,48	3,22	3,21	3,09	2,69
3	Industri	0,82	0,77	0,75	0,79	0,90	0,95	0,99
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	0,12	0,12	0,10	0,10	0,12	0,12	0,13
5	Konstruksi	0,56	0,54	0,53	0,54	0,62	0,63	0,66
6	Perdagangan, Rumah Makan, dan Akomodasi	0,40	0,41	0,38	0,46	0,53	0,56	0,59
7	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	0,14	0,13	0,13	0,12	0,13	0,13	0,12
8	Lembaga Keuangan	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
9	Jasa Kemasyarakatan	0,10	0,10	0,10	0,11	0,13	0,13	0,14

## Lampiran 2

### Perhitungan Location Quotient

$$LQ_i = \frac{v_i/v_t}{V_i/V_t}$$

Dimana :  $LQ_i$  = Nilai LQ Sektor i.

$V_i$  = Pendapatan (PDRB) sektor ke 1 Provinsi Riau.

$V_t$  = Total PDRB Provinsi Riau.

$v_i$  = PDB sektor ke Nasional.

$v_t$  = Total PDB Nasional.

#### 1. LQ Tahun 2011

##### a. Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan

$$LQ = \frac{99.561,48/467.212,78}{1.058.245,30/6.094.908,10}$$

$$LQ = 1,23$$

##### b. Sektor Pertambangan dan Penggalian

$$LQ = \frac{189.561,42/467.212,78}{924.813,40/6.094.908,10}$$

$$LQ = 2,68$$

##### c. Sektor Industri

$$LQ = \frac{107.243,25/467.212,78}{1.704.250,50/6.094.908,10}$$

$$LQ = 0,82$$

d. Sektor Listrik, Gas, dan Air Minum

$$LQ = \frac{58,95/467.212,78}{6.208,80/6.094.908,10}$$

$$LQ = 0,12$$

e. Sektor Konstruksi

$$LQ = \frac{30.647,06/467.212,78}{712.184,40/6.094.908,10}$$

$$LQ = 0,56$$

f. Sektor Perdagangan, Rumah Makan, dan Akomodasi

$$LQ = \frac{32.895,93/467.212,78}{1.066.092,10/6.094.908,10}$$

$$LQ = 0,40$$

g. Sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi

$$LQ = \frac{2.875,28/467.212,78}{276.122,40/6.094.908,10}$$

$$LQ = 0,14$$

h. Sektor Lembaga Keuangan

$$LQ = \frac{3.416,36/467.212,78}{270.586,30/6.094.908,10}$$

$$LQ = 0,16$$

i. Sektor Jasa Kemasyarakatan

$$LQ = \frac{612,05/467.212,78}{76.404,90/6.094.908,10}$$

$$LQ = 0,10$$

2. LQ Tahun 2012

- a. Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan

$$LQ = \frac{106.538,79/537.557,87}{1.152.262,10/6.670.942,80}$$

$$LQ = 1,15$$

- b. Sektor Pertambangan dan Penggalian

$$LQ = \frac{235.437,55/537.557,87}{1.000.307,60/6.670.942,80}$$

$$LQ = 2,92$$

- c. Sektor Industri

$$LQ = \frac{115.048,88/537.557,87}{1.848.150,90/6.670.942,80}$$

$$LQ = 0,77$$

- d. Sektor Listrik, Gas, dan Air Minum

$$LQ = \frac{63,38/537.557,87}{6.603,80/6.670.942,80}$$

$$LQ = 0,12$$

- e. Sektor Konstruksi

$$LQ = \frac{34.843,61/537.557,87}{805.208,10/6.670.942,80}$$

$$LQ = 0,54$$

- f. Sektor Perdagangan, Rumah Makan, dan Akomodasi

$$LQ = \frac{37.354,61/537.557,87}{1.138.484,40/6.670.942,80}$$

$$LQ = 0,41$$

- g. Sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi

$$LQ = \frac{3.311,21/537.557,87}{313.156,20/6.670.942,80}$$

$$LQ = 0,13$$

- h. Sektor Lembaga Keuangan

$$LQ = \frac{4.253,65/537.557,87}{320.534,30/6.670.942,80}$$

$$LQ = 0,16$$

- i. Sektor Jasa Kemasyarakatan

$$LQ = \frac{705,87/537.557,87}{86.235,40/6.670.942,80}$$

$$LQ = 0,10$$

3. Tahun 2013

- a. Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan

$$LQ = \frac{115.444,55/584.813,23}{1.083.141,80/6.239.240,90}$$

$$LQ = 1,14$$

- b. Sektor Pertambangan dan Penggalian

$$LQ = \frac{256.395,34/584.813,23}{785.016,30/6.239.240,90}$$

$$LQ = 3,48$$

- c. Sektor Industri

$$LQ = \frac{124.879,98/584.813,23}{1.774.097,30/6.239.240,90}$$

$$LQ = 0,75$$

- d. Sektor Listrik, Gas, dan Air Minum

$$LQ = \frac{62,20/584.813,23}{6.587,10/6.239.240,90}$$

$$LQ = 0,10$$

- e. Sektor Konstruksi

$$LQ = \frac{38.268,20/584.813,23}{772.719,60/6.239.240,90}$$

$$LQ = 0,53$$

- f. Sektor Perdagangan, Rumah Makan, dan Akomodasi

$$LQ = \frac{40.289,00/584.813,23}{1.118.207,00/6.239.240,90}$$

$$LQ = 0,38$$

- g. Sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi

$$LQ = \frac{3.760,84/584.813,23}{308.521,20/6.239.240,90}$$

$$LQ = 0,13$$

- h. Sektor Lembaga Keuangan

$$LQ = \frac{4.925,50/584.813,23}{306.432,20/6.239.240,90}$$

$$LQ = 0,17$$

- i. Sektor Jasa Kemasyarakatan

$$LQ = \frac{787,62/584.813,23}{84.518,40/6.239.240,90}$$

$$LQ = 0,10$$

4. Tahun 2014

a. Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan

$$LQ = \frac{133.550,01/653.460,61}{1.409.655,70/8.130.247,10}$$

$$LQ = 1,18$$

b. Sektor Pertambangan dan Penggalian

$$LQ = \frac{268.819,88/653.460,61}{1.039.423,00/8.130.247,10}$$

$$LQ = 3,22$$

c. Sektor Industri

$$LQ = \frac{141.874,68/653.460,61}{2.227.584,00/8.130.247,10}$$

$$LQ = 0,79$$

d. Sektor Listrik, Gas, dan Air Minum

$$LQ = \frac{65,79/653.460,61}{7.840,60/8.130.247,10}$$

$$LQ = 0,10$$

e. Sektor Konstruksi

$$LQ = \frac{45.437,97/653.460,61}{1.041.949,50/8.130.247,10}$$

$$LQ = 0,54$$

f. Sektor Perdagangan, Rumah Makan, dan Akomodasi

$$LQ = \frac{52.868,66/653.460,61}{1.419.239,40/8.130.247,10}$$

$$LQ = 0,46$$

g. Sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi

$$LQ = \frac{4.457,96/653.460,61}{466.968,90/8.130.247,10}$$

$$LQ = 0,12$$

h. Sektor Lembaga Keuangan

$$LQ = \frac{5.430,50/653.460,61}{408.438,80/8.130.247,10}$$

$$LQ = 0,17$$

i. Sektor Jasa Kemasyarakatan

$$LQ = \frac{955,16/653.460,61}{109.147,20/8.130.247,10}$$

$$LQ = 0,11$$

5. Tahun 205

a. Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan

$$LQ = \frac{144.218,91/623.426,08}{1.555.207,00/8.740.355,60}$$

$$LQ = 1,30$$

b. Sektor Pertambangan dan Penggalian

$$LQ = \frac{201.796,80/623.426,08}{881.694,10/8.740.355,60}$$

$$LQ = 3,21$$

c. Sektor Industri

$$LQ = \frac{155.685,92/623.426,08}{2.418.891,70/8.740.355,60}$$

$$LQ = 0,90$$

d. Sektor Listrik, Gas, dan Air Minum

$$LQ = \frac{72,06/623.426,08}{8.546,30/8.740.355,60}$$

$$LQ = 0,12$$

e. Sektor Konstruksi

$$LQ = \frac{51.673,30/623.426,08}{1.177.084,10/8.740.355,60}$$

$$LQ = 0,62$$

f. Sektor Perdagangan, Rumah Makan, dan Akomodasi

$$LQ = \frac{57.952,65/623.426,08}{1.532.876,70/8.740.355,60}$$

$$LQ = 0,53$$

g. Sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi

$$LQ = \frac{5.185,48/623.426,08}{578.464,30/8.740.355,60}$$

$$LQ = 0,13$$

h. Sektor Lembaga Keuangan

$$LQ = \frac{5.664,92/623.426,08}{464.399,90/8.740.355,60}$$

$$LQ = 0,17$$

i. Sektor Jasa Kemasyarakatan

$$LQ = \frac{1.176,04/623.426,08}{123.191,50/8.740.355,60}$$

$$LQ = 0,13$$

6. Tahun 2016

a. Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan

$$LQ = \frac{156.825,88/651.076,05}{1.671.330,30/9.336.894,50}$$

$$LQ = 1,35$$

b. Sektor Pertambangan dan Penggalian

$$LQ = \frac{191.970,57/651.076,05}{890.868,30/9.336.894,50}$$

$$LQ = 3,09$$

c. Sektor Industri

$$LQ = \frac{168.241,90/651.076,05}{2.545.203,50/9.336.894,50}$$

$$LQ = 0,95$$

d. Sektor Listrik, Gas, dan Air Minum

$$LQ = \frac{75,56/651.076,05}{8.942,50/9.336.894,50}$$

$$LQ = 0,12$$

e. Sektor Konstruksi

$$LQ = \frac{56.999,52/651.076,05}{1.287.659,30/9.336.894,50}$$

$$LQ = 0,63$$

- f. Sektor Perdagangan, Rumah Makan, dan Akomodasi

$$LQ = \frac{63.956,78/651.076,05}{1.635.259,00/9.336.894,50}$$

$$LQ = 0,56$$

- g. Sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi

$$LQ = \frac{5.640,18/651.076,05}{644.999,50/9.336.894,50}$$

$$LQ = 0,13$$

- h. Sektor Lembaga Keuangan

$$LQ = \frac{6.141,36/651.076,05}{520.087,50/9.336.894,50}$$

$$LQ = 0,17$$

- i. Sektor Jasa Kemasyarakatan

$$LQ = \frac{1.224,30/651.076,05}{132.544,60/9.336.894,50}$$

$$LQ = 0,13$$

7. Tahun 2017

- a. Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan

$$LQ = \frac{166.772,36/672.749,40}{1.785.880,70/10.192.664,90}$$

$$LQ = 1,41$$

- b. Sektor Pertambangan dan Penggalian

$$LQ = \frac{182.967,67/672.749,40}{1.028.772,20/10.192.664,90}$$

$$LQ = 2,69$$

c. Sektor Industri

$$LQ = \frac{178.589,42/672.749,40}{2.739.415,00/10.192.664,90}$$

$$LQ = 0,99$$

d. Sektor Listrik, Gas, dan Air Minum

$$LQ = \frac{80,95/672.749,40}{9.720,30/10.192.664,90}$$

$$LQ = 0,13$$

e. Sektor Konstruksi

$$LQ = \frac{61.695,54/672.749,40}{1.409.833,80/10.192.664,90}$$

$$LQ = 0,66$$

f. Sektor Perdagangan, Rumah Makan, dan Akomodasi

$$LQ = \frac{69.033,80/672.749,40}{1.767.718,30/10.192.664,90}$$

$$LQ = 0,59$$

g. Sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi

$$LQ = \frac{6.039,48/672.749,40}{735.229,60/10.192.664,90}$$

$$LQ = 0,12$$

h. Sektor Lembaga Keuangan

$$LQ = \frac{6.254,33/672.749,40}{571.128,50/10.192.664,90}$$

$$LQ = 0,17$$

i. Sektor Jasa Kemasyarakatan

$$LQ = \frac{1.314,85/672.749,40}{144.966,50/10.192.664,90}$$

$$LQ = 0,14$$

Lampiran 3

Perhitungan Elastisitas Kesempatan Kerja Provinsi Riau

Tahun 2011-2017

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB Provinsi Riau (%)							Pertumbuhan Tenaga Kerja Provinsi Riau (%)						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	3,46	3,82	4,4	6,15	0,43	3,98	5,28	12,07	-1,2	3,12	0,79	-2,42	6,45	-3,98
2	Pertambangan dan Penggalian	3,11	-1,43	-4,44	-5,24	-6,95	-4,22	-6,25	19,23	18,58	-2,73	8,56	-18,53	7,81	-30,11
3	Industri	8,47	6,83	6,95	5,63	3,63	4,61	5,51	14,91	0,47	8,63	3,06	-7	37,11	-12,71
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	1,21	0,87	0,64	1,06	2,41	-0,45	4,75	47,95	-20,78	-16,69	69,22	-51,12	225,23	-70,58
5	Konstruksi	10,49	3,7	2,65	8,46	6,39	4,92	5,92	0,25	-1,92	10,46	-6,29	15,16	8,02	-2,09
6	Perdagangan, Rumah Makan, dan Akomodasi	7,48	10,98	5,59	3,96	1,49	4,88	6,37	20,21	0,37	0,21	7,39	-1,75	-1	18,16
7	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	7,1	11,19	6,76	7,99	5,38	3,06	4,33	-6,82	1,85	-6,41	2,86	5,04	20,5	-1,36
8	Lembaga Keuangan	8,93	13,45	9,83	4,93	0,35	5,65	-2,24	86,57	25,53	-10,62	-10,38	17,36	-1,1	9,55
9	Jasa Kemasyarakatan	8,59	9,19	8,51	8,4	9,94	0,56	5,82	1,82	-8,83	10,7	-1,82	17,21	9,93	3,72

Lanjutan Lampiran 3

No	Lapangan Usaha	Elastisitas Kesempatan Kerja Provinsi Riau						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	3,49	-0,31	0,71	0,13	-5,63	1,62	-0,75
2	Pertambangan dan Penggalian	6,18	-12,99	0,61	-1,63	2,67	-1,85	4,82
3	Industri	1,76	0,07	1,24	0,54	-1,93	8,05	-2,31
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	39,63	-23,89	-26,08	65,30	-21,21	-500,51	-14,86
5	Konstruksi	0,02	-0,52	3,95	-0,74	2,37	1,63	-0,35
6	Perdagangan, Rumah Makan, dan Akomodasi	2,70	0,03	0,04	1,87	-1,17	-0,20	2,85
7	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-0,96	0,17	-0,95	0,36	0,94	6,70	-0,31
8	Lembaga Keuangan	9,69	1,90	-1,08	-2,11	49,60	-0,19	-4,26
9	Jasa Kemasyarakatan	0,21	-0,96	1,26	-0,22	1,73	17,73	0,64

## Lampiran 4

### Perhitungan Elastisitas Kesempatan Kerja

$$\text{Elastisitas T.K} = \frac{\% \text{ Pertumbuhan Tenaga Kerja Basis}}{\% \text{ Pertumbuhan Sektor Basis}}$$

#### 1. Elastisitas T.K Tahun 2011

- a. Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan

$$\text{E.T.K} = \frac{12,07}{3,46} = 3,49$$

- b. Sektor Pertambangan dan Penggalian

$$\text{E.T.K} = \frac{19,23}{3,11} = 6,18$$

- c. Sektor Industri

$$\text{E.T.K} = \frac{14,91}{8,47} = 1,76$$

- d. Sektor Listrik, Gas, dan Air Minum

$$\text{E.T.K} = \frac{47,95}{1,21} = 39,63$$

- e. Sektor Konstruksi

$$\text{E.T.K} = \frac{0,25}{10,49} = 0,02$$

- f. Sektor Perdagangan, Rumah Makan, dan Akomodasi

$$\text{E.T.K} = \frac{20,21}{7,48} = 2,70$$

g. Sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi

$$E.T.K = \frac{-6,28}{7,1} = -0,96$$

h. Sektor Lembaga Keuangan

$$E.T.K = \frac{86,57}{8,93} = 9,69$$

i. Sektor Jasa Kemasyarakatan

$$E.T.K = \frac{1,82}{8,59} = 0,21$$

2. Elastisitas T.K Tahun 2012

a. Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan

$$E.T.K = \frac{-1,2}{3,82} = -0,31$$

b. Sektor Pertambangan dan Penggalian

$$E.T.K = \frac{18,58}{-1,43} = -12,99$$

c. Sektor Industri

$$E.T.K = \frac{0,47}{6,83} = 0,07$$

d. Sektor Listrik, Gas, dan Air Minum

$$E.T.K = \frac{-20,78}{0,87} = -23,89$$

e. Sektor Konstruksi

$$E.T.K = \frac{-1,92}{3,7} = -0,52$$

f. Sektor Perdagangan, Rumah Makan, dan Akomodasi

$$E.T.K = \frac{0,37}{10,98} = 0,03$$

g. Sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi

$$E.T.K = \frac{1,85}{11,19} = 0,17$$

h. Sektor Lembaga Keuangan

$$E.T.K = \frac{25,53}{13,45} = 1,90$$

i. Sektor Jasa Kemasyarakatan

$$E.T.K = \frac{-8,83}{9,19} = -0,96$$

3. Elastisitas T.K Tahun 2013

a. Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan

$$E.T.K = \frac{3,12}{4,4} = 0,71$$

b. Sektor Pertambangan dan Penggalian

$$E.T.K = \frac{-2,73}{-4,44} = 0,61$$

c. Sektor Industri

$$E.T.K = \frac{8,63}{6,95} = 1,24$$

d. Sektor Listrik, Gas, dan Air Minum

$$E.T.K = \frac{-16,69}{0,64} = -26,08$$

e. Sektor Konstruksi

$$E.T.K = \frac{10,46}{2,65} = 3,95$$

f. Sektor Perdagangan, Rumah Makan, dan Akomodasi

$$E.T.K = \frac{0,21}{5,59} = 0,04$$

g. Sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi

$$E.T.K = \frac{-6,41}{6,76} = -0,95$$

h. Sektor Lembaga Keuangan

$$E.T.K = \frac{-10,62}{9,83} = -1,08$$

i. Sektor Jasa Kemasyarakatan

$$E.T.K = \frac{10,7}{8,51} = 1,26$$

4. Elastisitas T.K Tahun 2014

a. Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan

$$E.T.K = \frac{0,79}{6,15} = 0,13$$

b. Sektor Pertambangan dan Penggalian

$$E.T.K = \frac{8,56}{-5,24} = -1,63$$

c. Sektor Industri

$$E.T.K = \frac{3,06}{5,63} = 0,54$$

d. Sektor Listrik, Gas, dan Air Minum

$$E.T.K = \frac{69,22}{1,06} = 65,30$$

e. Sektor Konstruksi

$$E.T.K = \frac{-6,29}{8,46} = -0,74$$

f. Sektor Perdagangan, Rumah Makan, dan Akomodasi

$$E.T.K = \frac{7,39}{3,96} = 1,87$$

g. Sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi

$$E.T.K = \frac{2,86}{7,99} = 0,36$$

h. Sektor Lembaga Keuangan

$$E.T.K = \frac{-10,38}{4,93} = -2,11$$

i. Sektor Jasa Kemasyarakatan

$$E.T.K = \frac{-1,82}{8,4} = -0,22$$

5. Elastisitas T.K Tahun 2005

a. Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan

$$E.T.K = \frac{-2,42}{0,43} = -5,63$$

b. Sektor Pertambangan dan Penggalian

$$E.T.K = \frac{-18,53}{-6,95} = 2,67$$

c. Sektor Industri

$$E.T.K = \frac{-7,00}{3,63} = -1,93$$

d. Sektor Listrik, Gas, dan Air Minum

$$E.T.K = \frac{-51,12}{2,41} = -21,21$$

e. Sektor Konstruksi

$$E.T.K = \frac{15,16}{6,39} = 2,37$$

f. Sektor Perdagangan, Rumah Makan, dan Akomodasi

$$E.T.K = \frac{-1,75}{1,49} = -1,17$$

g. Sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi

$$E.T.K = \frac{5,04}{5,38} = 0,94$$

h. Sektor Lembaga Keuangan

$$E.T.K = \frac{17,36}{0,35} = 49,60$$

i. Sektor Jasa Kemasyarakatan

$$E.T.K = \frac{17,21}{9,94} = 1,73$$

6. Elastisitas T.K Tahun 2016

a. Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan

$$E.T.K = \frac{6,45}{3,98} = 1,62$$

b. Sektor Pertambangan dan Penggalian

$$E.T.K = \frac{7,81}{-4,22} = -1,85$$

c. Sektor Industri

$$E.T.K = \frac{37,11}{4,61} = 8,05$$

d. Sektor Listrik, Gas, dan Air Minum

$$E.T.K = \frac{225,23}{-0,45} = -500,51$$

e. Sektor Konstruksi

$$E.T.K = \frac{8,02}{4,92} = 1,63$$

f. Sektor Perdagangan, Rumah Makan, dan Akomodasi

$$E.T.K = \frac{-1,00}{4,88} = -0,20$$

g. Sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi

$$E.T.K = \frac{20,5}{3,06} = 6,70$$

h. Sektor Lembaga Keuangan

$$E.T.K = \frac{-1,10}{5,65} = -0,19$$

i. Sektor Jasa Kemasyarakatan

$$E.T.K = \frac{9,93}{0,56} = 17,73$$

7. Elastisitas T.K Tahun 2017

- a. Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan

$$E.T.K = \frac{-3,98}{5,28} = -0,75$$

- b. Sektor Pertambangan dan Penggalian

$$E.T.K = \frac{-30,11}{-6,25} = 4,82$$

- c. Sektor Industri

$$E.T.K = \frac{-12,71}{5,51} = -2,31$$

- d. Sektor Listrik, Gas, dan Air Minum

$$E.T.K = \frac{-70,58}{4,75} = -14,86$$

- e. Sektor Konstruksi

$$E.T.K = \frac{-2,09}{5,92} = -0,35$$

- f. Sektor Perdagangan, Rumah Makan, dan Akomodasi

$$E.T.K = \frac{18,16}{6,37} = 2,85$$

- g. Sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi

$$E.T.K = \frac{-1,36}{4,33} = -0,31$$

- h. Sektor Lembaga Keuangan

$$E.T.K = \frac{9,55}{-2,24} = -4,26$$

- i. Sektor Jasa Kemasyarakatan

$$\text{E.T.K} = \frac{3,72}{5,82} = 0,64$$